Parlah Contain

Hujan Kritik Tapera





Parlementaria

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.IP., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website) Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media) Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansvah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri,

S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick

Munchen, Moh. Farhan NF

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya,

Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan,

Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email:bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



4 PROLOG Hujan Kritik Tapera

6 LAPORAN UTAMA

- PP Terbit Tanpa Mendengar Masukan
- Tapera Butuh Sosialisasi Masif
- Tapera Perlu Dievaluasi
- Tak Harus Dipaksakan

16 SUMBANG SARAN luaran Tapera Sebaiknya Dibatalkan

18 PENGAWASAN

Pro Kontra Starlink Keadilan dan Kedaulatan Dipertanyakan

20 ANGGARAN

RAPBN 2025 Untuk Hadapi Tantangan Global

22 LEGISLASI

Revisi UU Kelautan : Menjaga Potensi Kekayaan Laut Indonesia

24 FOTO BERITA

28 LENSA PARLE

Jakarta di Akhir Status Ibu Kota

30 PROFIL

Wisnu Wijaya: Dari Pengusaha Jadi Politisi Pembela Rakyat

34 KUNKER









ANGGARAN 20 Revisi UU Kelautan: Menjaga Potensi Kekayaan Laut Indonesia

- 56 Kebijakan Ngawur, Membagi IUPK untuk Ormas
- **LIPUTAN KHUSUS** 58 DPR - Republik Rakyat Tiongkok Jajaki Kerja sama Diplomatik Baru
- **DAPIL** 60
- TOKOH Mbah Tono 70 Pemulung yang Berhaji
- **72** Menghidupkan Semangat Berbagi
- **KIAT SEHAT** 74 Jangan Biarkan Serangan Jantung Menghantui Kita
- **WISATA** 76 **Dari Benteng Kolonial sampai Rumah Pionis Kosmetik Nusantara**
- **HOBI 78 Eko Patrio: Hobi Bermain Lego**
- **POJOK PARLE 79** Basuki Digoda Boyman Harun

SCAN QR UNTUK BERITA TERKINI SEPUTAR DPR RI





Ikuti Akun Media Sosial DPR RI Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id





















www.dpr.go.id

Hujan Kritik TAPERA



Polemik kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) menyeruak seketika, meramaikan perbincangan publik. Reaksi penolakan datang dari para pekerja, bahkan pengusaha. Tabungan wajib yang dipolemikkan itu bersumber dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Program Tapera sebetulnya mulai diberlakukan pada 2027. Tapi, kritik sudah menghujaninya.



KEPESERTAAN

Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD,

BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh Badan Pengelola (BP Tapera).

Melalui Tapera, pemerintah membentuk "kolam pendanaan" yang berasal dari iuran pekerja. Pekerja swasta, karyawan perusahaan pelat merah, aparatur negara, hingga tenaga kerja asing wajib menyetor 2,5 persen pendapatan mereka. Pemberi kerja pun tidak luput dari iuran ini. Pengusaha menomboki sisanya atau 0,5 persen agar dana yang terkumpul setara dengan 3 persen penghasilan pekerja. Hal inilah yang kemudian memancing reaksi dari pekerja dan pemberi kerja yang menolak pemberlakuan simpanan Tapera karena dianggap akan semakin membebani mereka.

Pemerintah sebetulnya telah memiliki program subsidi perumahan berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sumber dananya berasal dari APBN, guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah mencicil rumah dengan suku bunga tetap 5 persen per tahun dengan tenor cicilan hingga 20 tahun.

Pada 2023, program FLPP disalurkan kepada 229.000 unit rumah, terdiri dari 228.914 unit rumah tapak senilai Rp26,31 triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp11,94 miliar. APBN yang digelontorkan untuk program FLPP 2023 mencapai Rp26,32 triliun. Namun, target penyaluran FLPP pada 2024 turun menjadi 166.000 unit rumah dengan nilai sebesar Rp21,6 triliun.

Meski sudah ada subsidi melalui FLPP, masalah perumahan di Indonesia masih belum terselesaikan. Backlog atau kekurangan perumahan di Indonesia saat ini mencapai 12,7 juta unit. Artinya, ada 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah.

Tak hanya itu, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2023 terdapat 26 juta orang yang rumahnya tidak layak huni. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah menghadirkan skema pembiayaan baru melalui iuran Tapera, yang diharapkan dapat menekan angka backlog perumahan yang masih tinggi.

Namun problematika Tapera tidak sebatas besaran iurannya saja, melainkan juga pada aspek substansi dan teknis belum mampu dijawab dengan terang benderang oleh pemerintah. Jika bentuk dari regulasi ini adalah pemenuhan perumahan, yang terkategori sebagai kebutuhan primer, semestinya akan disambut antusias oleh publik, namun malah sebaliknya.

Problem sesungguhnya terletak pada ketidakpercayaan publik pada tata kelola pemerintahan yang bersih. Latar psikologis publik masih dipenuhi dengan karut marut ragam korupsi. Banyak keraguan, tentu saja tidak mau alternatif investasi yang ditawarkan ternyata memberi imbal hasil bodong.

Hal inilah juga yang dirasakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia menjelaskan, kalau aturan mengenai iuran Tapera sebetulnya sudah disiapkan sejak tahun 2016. Namun, kebijakan itu baru bisa ditetapkan pada tahun 2027. Itu pun dengan status diundur demi bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat.

Namun, simpanan Tapera ini tentu masih akan berlaku ke depan, karena telah diperkuat dengan regulasi, yakni PP No.21/2024 tentang Perubahan atas PP No.25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Karena itu, jika pekerja maupun pegawai menolak kebijakan ini, maka solusinya adalah pembatalan aturan tersebut yang bisa diajukan ke MA atau meminta judicial review kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mencabut kembali PP tersebut.

Lalu bagaimana dengan sikap DPR? DPR sendiri, melalui Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Kamis (6/6) silam, menegaskan, pihaknya segera menggelar agenda rapat khusus pembahasan Tapera tersebut. Lasarus bahkan menilai dikeluarkannya PP itu masih belum mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

"Harusnya PP ini kemarin sebelum diterbitkan harus mendengarkan masukan dulu, semua orang didengarkan. Kalau tidak, berarti PP ini dikeluarkan tanpa mendengarkan masukan dari semua pihak," kata politisi Fraksi PDI Perjuangan itu. DPR pun dalam berbagai kesempatan gencar melayangkan gelombang protes terhadap program Tapera ini. Para anggota DPR di komisi yang bersinggungan dengan program Tapera ini blak-blakan menyebut, Tapera sebagai program yang belum siap

Perihal kesiapan ini sendiri, diakui Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, yang menilai BP Tapera masih memiliki keterbatasan dari sisi teknologi informasi, hingga SDM pendukungnya. "Saat ini kami hanya (memiliki) 197 pegawai dan belum punya kantor cabang di seluruh Indonesia. Ini harus dipikirkan. Pasti secara gradual tidak mungkin tiba-tiba semuanya dipungut harus disimpan, harus ditabung," pungkasnya.

PP Terbit Tanpa Mendengar Masukan

Penolakan publik terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera terus bergulir. Menyikapi ini, pemerintah belum memberikan ketegasan bakal melanjutkan atau menunda pemberlakuan ketentuan yang akan memotong 3 persen dari gaji atau penghasilan pekerja.



DI tengah polemik publik terkait pelaksanaan Tapera, sinyal penundaan iuran Tapera muncul ketika Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pelaksanaan Tapera tidak harus tergesa-gesa namun akan tetap berlaku penuh Tentu ini memberatkan. Oleh karenanya mendapat penolakan luas dari semua pihak

Lasarus Ketua Komisi V DPR RI pada 2027. Ini sekaligus membantah bahwa program itu ditunda imbas ramai penolakan.

Basuki menegaskan, berdasarkan ketentuan yang ada, implementasi program Tapera memang dilaksanakan pada 2027. Terkait kejelasan program Tapera ini, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada awal Juni lalu, mendesak penundaan Tapera tersebut, menyusul banyak keberatan dari karyawan dan pengusaha.

"Titik ini yang paling rumit Pak, yang mau dipotong keberatan, pemotong pun keberatan. Titik temu ini menurut saya yang harus dicarikan jalan keluarnya dulu. Oleh karenanya, kami nanti akan mengundang semua pihak, Pak. Ya rapat dulu. Dunia usaha kita undang, mungkin perwakilan para buruh, baru nanti kita undang teman-teman dari Tapera," tegasnya.

Berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat, upah karyawan
swasta akan dipangkas 3% tiap
bulannya untuk Tapera. Rincian



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.



Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat diwawancarai Parlementaria.

pemotongan 3% itu dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja.

Hal ini dianggap Lasarus memberatkan finansial karyawan swasta atau buruh. "Tentu ini memberatkan. Oleh karenanya mendapat penolakan luas dari semua pihak," tuturnya. Lebih lanjut, Lasarus menilai, PP itu masih belum mendengarkan masukan dari berbagai pihak. "Harusnya PP ini kemarin sebelum diterbitkan mendengarkan masukan dulu. Semua orang didengarkan. Kalau tidak, berarti PP ini dikeluarkan tanpa mendengarkan masukan dari semua pihak," kata Lasarus.

Lasarus juga menyoroti kritik yang muncul dari kalangan pengusaha. Menurutnya, permasalahan ini perlu diatasi pemerintah dengan melibatkan banyak pihak dalam menyusun aturan Tapera. Kritik keras juga dilayangkan Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Menurutnya, kewajiban menyediakan

Pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi agar kebijakan ini bisa diintegrasikan dengan bebanbeban sejenis. Karena memang ada

beberapa hal yang

menurut saya salah

kaprah dalam UU ini.

Suryadi Jaya Purnama Anggota Komisi V DPR R rumah ialah kewajiban negara bukan kewajiban pekerja.

"Saya kira pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi agar kebijakan ini bisa diintegrasikan dengan beban-beban sejenis. Karena memang ada beberapa hal yang menurut saya salah kaprah dalam UU ini, termasuk di PP ini. Pertama, kewajiban penyediaan rumah itu adalah kewajiban negara, hak warga negara. Tetapi kemudian berubah menjadi kewajiban pekerja," ungkap Suryadi.

Dia menilai, ada kesalahan dalam penerapan PP No.21 tahun 2024 tentang Tapera. Namanya tabungan harusnya bersifat sukarela. "Tidak merupakan sesuatu yang wajib. Belum lagi kalau tabungan kita melalui perbankan itu dijamin oleh LPS. Tetapi, ini kan tidak ada jaminan. Bahkan, kalau dikatakan ini asuransi juga, buktinya tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh pekerja," sambung politisi Fraksi PKS ini.

Inilah yang menjadi pertimbangan Suryadi mendorong agar dilakukan evaluasi, tidak saja PP-nya, tapi juga UU-nya. "Saya kira DPR melalui komisi akan segera berkoordinasi, melakukan rapat kerja dengan pemerintah untuk mencoba merumuskan kebijakan apa yang akan diambil," katanya. Ia juga mengungkapkan, kepercayaan publik terhadap berbagai dana yang dihimpun pemerintah sangat minim. Mengingat, banyak kasus serupa yang tidak bisa dicairkan karena berbagai masalah.

"Misalnya di Tapera ini kan merupakan kelanjutan dari Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan) dulu. Baparatum itu kan pesertanya PNS, kemudian TNI dan Polri. Kenyataannya, dana mereka banyak yang sudah pensiun tetapi tidak bisa dicairkan. Belum lagi ada trauma tentang kasus Asabri dan Jiwasraya. Sehingga, publik memang perlu diyakinkan bahwa dana mereka aman," katanya.

Tapera Butuh Sosialisasi Masif

Penolakan publik terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera terus bergulir. Menyikapi ini, pemerintah belum memberikan ketegasan bakal melanjutkan atau menunda pemberlakuan ketentuan yang akan memotong 3 persen dari gaji atau penghasilan pekerja.



kasus Jiwasraya, Taspen, hingga Asabri. Kami berharap pemerintah melakukan sosialisasi masif atas keuntungan dan jaminan jika program Tapera benar bermanfaat bagi pesertanya," kilahnya, akhir Mei lalu.

Banyaknya kasus fraud (penipuan) di badan pengelola keuangan, kata Fathan, menjadi ganjalan bagi publik untuk ikut Tapera. Menurutnya, publik akan mengaitkan penyalahgunaan dana peserta oleh pengelola dalam kasus Taspen, Asabri, maupun Jiwasraya dengan keamanan program Tapera.

"Apalagi dalam berbagai kasus penyalahgunaan dana di badan pengelola keuangan seperti Taspen, Asabri, dan Jiwasraya, nasabah yang banyak dirugikan. Mereka harus mengejar uang mereka sendiri karena ketidakjelasan jaminan dari pemerintah," ujar politisi PKB itu.

Kepercayaan publik, lanjutnya, juga perlu dibangun sehingga mereka tidak curiga terhadap manfaat dana Tapera untuk mengakses kepemilikan rumah layak huni. Apalagi, defisit perumahan layak huni di Indonesia masuk relatif besar. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023, kekurangannya mencapai 12,7 juta unit.

"Secara normatif tujuan program Tapera ini memang baik. Kendati demikian, ketika bersifat mandatori keikutsertaannya, maka harus ada penjelasan komprehensif, karena mengikat semua pekerja dan kalangan usaha," pungkasnya.

Senada dengan Fathan, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad juga menilai pro-kontra masyarakat mengenai PP tersebut merupakan hal wajar. PP tersebut tak perlu dihapus. Namun, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan mengakomodir semua aspirasi masyarakat.

"Saya melihat PP ini tidak perlu dibatalkan, cukup disosialisasikan dan dibuat turunan peraturannya oleh Komite Badan Pengelola Tapera. Lalu, aspirasi diserap supaya



Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad.

Saya melihat PP ini tidak perlu dibatalkan, cukup disosialisasikan dan dibuat turunan peraturannya oleh Komite Badan Pengelola Tapera. Lalu, aspirasi diserap supaya bisa diakomodir dalam turunan pengelolaan PP 21. Sehingga, keadilan publik terwadahi

Kamrussamad Anggota Komisi XI DPR RI

bisa diakomodir dalam turunan pengelolaan PP 21. Sehingga, keadilan publik terwadahi," kata Kamrussamad, akhir Mei silam.

Sebetulnya pemerintah telah hadir untuk penyediaan rumah bagi masyarakat. Dia mencontohkan seperti di tahun 2024 ini, pemerintah menyediakan anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun untuk 166.000 rumah, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 0,68 triliun untuk 166.000 unit rumah.

Dalam PP No.21/2024 itu diatur besaran iuran peserta Tapera, yaitu sebesar 3 persen, dengan rincian 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan sisanya 2,5 persen ditanggung pekerja. Dia menambahkan, penataan pemukiman juga perlu dilakukan. Dia memandang perkembangan transportasi yang pesat harus dibarengi pembangunan hunian masyarakat.

Keterbatasan daya beli
masyarakat menjadi hal
yang perlu dipertimbangkan
dalam implementasi program
Tapera. Pemerintah diingatkan
memperhatikan kemampuan
ekonomi masyarakat, terutama
masyarakat kelas menengah ke
bawah yang perlu ditinjau pemerintah
dalam menjalankan program Tapera.

gal/mh

Tapera Perlu Dievaluasi

Kebijakan Pemerintah melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) justru memicu kemarahan rakyat. Dasar hukum Tapera UU No.4/2016, ternyata tak menarik perhatian khalayak. Masyarakat baru menyadari ketika PP No.21/2024 diterbitkan sebagai turunan UU yang akan memotong penghasilan pekerja.



BAHKAN,

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) santer diberitakan sedang merencanakan penghasilan

ojek online dipotong untuk program simpanan Tapera yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan Atas PP No.25/2020 tentang Penyelenggaran Tapera. Mengacu pada beleid tersebut, besaran simpanan peserta Tapera yang ditetapkan adalah tiga persen. Terbagi atas 0,5 persen ditanggung pemberi kerja, dan 2,5 persen dibayar pekerja melalui pemotongan gaji.

Pemerintah khususnya Kemenaker sebagai salah satu institusi pembentuk regulasi turunan, dapat melakukan kajian evaluasi terlebih dulu secara mendalam.

Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI



Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi.

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI & Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, semasih menyusun regulasi teknis terkait ojol yang akan tertuang dalam Permenaker, mengatakan, "Saat ini kami Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun regulasi teknis dalam bentuk Permenaker mengenai pengaturan tentang ojol."

Merespon polemik ini,
Anggota Komisi IX DPR RI
Nurhadi mengingatkan,
baiknya pemerintah khususnya
Kemenaker sebagai salah satu
institusi pembentuk regulasi
turunan, dapat melakukan kajian
evaluasi terlebih dulu secara
mendalam. Terlebih, masyarakat
masih trauma terhadap lembaga
pengelola keuangan yang
bermasalah.

Menurut Nurhadi, jika program ini baik, pekerja swasta pasti akan senang, mengingat proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pekerja perusahaan swasta agak rumit dan banyak syarat yang harus dipenuhi. Terlebih bagi driver ojol yang status hubungan kerjanya bersistem kemitraan.

"Setahu saya Tapera dibentuk sejak 2016 melalui UU No.4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Sebelumnya, hanya PNS (pegawai negeri sipil) yang diwajibkan menjadi peserta program ini, tetapi kali ini pekerja swasta dan mandiri ikut dilibatkan. Sedangkan posisi teman-teman driver ojol masuk kategori mandiri, karena sifat kerja kemitraan," ujar Nurhadi, dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, awal Juni lalu.

Pihaknya menegaskan, akan selalu memonitor dan mengkritisi apabila sudah ada rincian teknis pengelolaan dan implementasinya. Itu lantaran menyangkut dana yang akan dikelola lembaga negara yang dibentuk khusus menangani Tapera. Apalagi, penerapannya baru akan dimulai tahun 2027 nanti, sehingga masih ada waktu bagi pemerintah untuk mengkaji.

Sosialisasi Intensif

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan, meski program Tapera adalah satu langkah baik dari pemerintah yang ditujukan untuk memberikan rumah layak bagi rakyat Indonesia. Namun, ia pun mendorong sosialisasi Tapera digencarkan, agar masyarakat memahami keuntungan kebijakan ini, khususnya bagi para pegawai swasta. Gaji mereka tidak boleh dipotong sewenang-wenang.

Himbauan tersebut bukanlah tanpa alasan, menimbang berdasarkan tinjauan di lapangan, ditemui banyak masyarakat belum mengetahui secara rinci terkait penggunaan dana Tapera, sehingga memicu kericuhan yang terjadi di tengah masyarakat. Walaupun menurutnya, kebijakan

K ebijakan itu
harus dibicarakan
dengan baik,
disosialisasikan. Tapi
memang ditanamkan
kesadaran kepada dia
(masyarakat) bahwa
uang yang dipotong
itu harus dengan
keikhlasan dia dan itu
untuk kebaikan dia

yang dibuat oleh pemerintah adalah bertujuan untuk kebaikan.

"Cuma saja, kebijakan itu harus dibicarakan dengan baik, disosialisasikan. Tapi memang ditanamkan kesadaran kepada dia (masyarakat) bahwa uang yang dipotong itu harus dengan keikhlasan dia dan itu untuk kebaikan dia supaya suatu waktu dia bisa punya rumah sendiri," jelas politisi Fraksi Partai

Karena kalau didiamkan saja, masyarakat terlena, sehingga tidak berhemat menggunakan uang hingga berujung tidak punya rumah. Dan jika masyarakat tidak mempunyai rumah nantinya akan sangat berisiko tinggi bukan hanya buat dirinya, akan tetapi anaknya dikhawatirkan juga bisa terdampak stunting akibat tidak hidup di rumah yang sehat. — pun/mh



FOTO: MUNCHEN/VEL

Tak Harus Dipaksakan



PENERBITAN

Peraturan
Pemerintah
Nomor 21 Tahun
2024 tentang
perubahan
atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 25 Tahun

2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh Presiden Joko Widodo direspon negatif oleh para anggota DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, misalnya, menyatakan, kebijakan Tapera berpotensi mencekik pekerja mandiri. "Pertimbangan ini merujuk pada kemungkinan hadirnya beban keuangan tambahan yang signifikan bagi para pekerja mandiri. Pada Pasal 15 ayat (5a) dijelaskan bahwa landasan kalkulasi besaran simpanan peserta pekerja mandiri ditentukan

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah tengah berencana mengikutkan pegawai swasta dalam program tabungan perumahan rakyat (Tapera). Kelak, tanggal 10 setiap bulan, 3 persen gaji para pegawai akan dipotong untuk iuran Tapera. Kegaduhan pun muncul sebagai reaksi kebijakan Tapera.

oleh jumlah gaji yang dilaporkan.

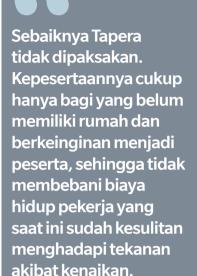
Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, pemotongan pendapatan pekerja dapat berdampak pada kemerosotan daya beli dan kualitas hidup yang substansial. Memang benar, kehadiran Tapera mampu menjadi jembatan untuk memastikan masyarakat memiliki akses kepemilikan rumah di masa yang

akan datang. Namun, diingatkannya tidak semua masyarakat yang bekerja itu sejahtera.

"Sebaiknya hilangkan niat pemerintah dalam mengambil uang dari pekerja dengan alasan untuk tabungan perumahan, batalkan dan kembali fokus buat kebijakan yang menyejahterakan masyarakat," tegas Alifudin dalam siaran pers yang diterima



Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin.







Parlementaria, di Jakarta, awal Juni lalu.

Bagi pekerja mandiri, tidak selamanya gaji yang mereka terima akan memiliki tetapan yang sama. Mereka diwajibkan membayar simpanan, sedangkan kebutuhan harian mereka bisa saja tidak terpenuhi. Maka, tentu keputusan tersebut mencekik dan bertentangan dengan norma kesusilaan.

Walaupun Tapera mampu memfasilitasi kepemilikan rumah, beleid ini disahkan tanpa melalui pertimbangan terkait kerentanan yang diterima pekerja mandiri. Dengan beban persyaratan pembayaran minimum hingga risiko pencabutan status kepesertaan sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) dan (3), pekerja mandiri akan diikat oleh pikulan finansial dan administrasi yang eksesif.

Seluruh elit pemerintah diserukan mengkaji ulang bahkan membatalkan peraturan tersebut. DPR meminta pemerintah tidak memaksakan pemberlakuan PP No.21/2024 tentang Tapera. Pasalnya, PP tersebut menjadi sumber polemik di masyarakat.

Jangan Paksa

Senada, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyarankan pemerintah tidak memaksakan penerapan Tapera. Sebab, potongan Tapera dinilainya akan sangat memberatkan pekerja. Dengan ada Tapera plus BPJS yang ada sebelumnya, potongan upah bisa mencapai 6 persen.

Besaran simpanan peserta Tapera yang ditetapkan yaitu 3 persen dari gaji atau upah peserta pekerja, dengan rincian 0.5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2.5 persen ditanggung pekerja. Menurut Irma, hal ini cukup memberatkan pekerja. Sebab, saat ini sudah ada 2 potongan yang menjadi beban pekerja untuk golongan menengah bawah, yaitu potongan untuk BPJS Kesehatan 1 persen dan BPJS Ketenagakerjaan 2 persen.

Irma mengilustrasikan, jika gaji buruh Rp5 juta, maka total potongan yang harus ditanggungnya sebesar Rp300 ribu. Dana sebesar itu bagi pekerja berpendapatan UMR tentu sangat memberatkan. Karena bagi mereka, potongan 6 persen tersebut seharusnya sudah bisa untuk membayar tagihan listrik 1 bulan.

Jika niat pemerintah adalah agar rakyat Indonesia tidak kesulitan untuk memiliki rumah, kebijakan ini akan kontraproduktif bagi pekerja yang sudah memiliki rumah. Begitu juga bagi yang belum memiliki rumah, karena mereka baru bisa memilikinya saat pensiun.

Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, tentu mereka juga terbebani biaya sewa rumah selama belum pensiun. Dapat dibayangkan berapa sisa take home pay yang mereka terima untuk kehidupan sehari-hari.

Karena itu, Irma menyarankan sebaiknya Tapera tidak dipaksakan. Kepesertaannya cukup hanya bagi yang belum memiliki rumah dan berkeinginan menjadi peserta, sehingga tidak membebani biaya hidup pekerja yang saat ini sudah kesulitan menghadapi tekanan akibat kenaikan bahan-bahan pokok.



(Tabungan Perumahan Rakyat)

PP Nomor 25 Tahun 2020: Penyimpanan yang dilakukan oleh peserta Tapera secara periodik dalam jangka waktu tertentu hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaannya berakhir.

Bapertarum dibentuk tahun 1993 oleh Presiden Soeharto > RUU Tapera masuk Prolegnas tahun 2014 > UU Tapera disahkan 2016 > Bapertarum dibubarkan 24 Maret 2018 > PP Nomor 25 Tahun 2020 diterbitkan > Direvisi Jadi PP Nomor 21 Tahun 2024

Poin-Poin Penting Dalam PP No.21/2024

KEPESERTAAN:



PASAL 5

Avat (3) Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta

Ayat (4)

Pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta Ayat (5)

Peserta telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar



PASAL 7

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- Calon PNS
- Pegawai ASN
- Prajurit TNI
- Prajurit siswa TNI
- Anggota Polri
- Pejabat Negara
- Pekerja/buruh BUMN
- Pekerja/buruh BUMD
- Pekerja/buruh swasta



PASAL 23

Kepesertaan Tapera berakhir karena:

- Pensiun
- Mencapai 58 tahun bagi pekerja mandiri
- Meninggal dunia
- Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut

luran TAPERA sebesar 3%

- 0,5% ditanggung pemberi kerja
- 2,5% ditanggung pekerja



PASAL 15

Ayat (1)
besaran simpanan peserta
ditetapkan sebesar 3 persen dari
gaji atau upah untuk peserta
pekerja dan penghasilan untuk
peserta pekerja mandiri

Ayat (2)

besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen Ayat (3)

besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri Ayat (5a)

dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta pekerja mandiri dihitung dari penghasilan yang dilaporkan

PEMANFAATAN



PASAL 37

Ayat (1)
pemanfaatan dana
Tapera dilakukan untuk
pembiayaan perumahan
bagi peserta

Ayat (2) pembiayaan perumahan bagi peserta meliputi pembiayaan

- Pemilikan rumah
- Pembangunan rumah
- Perbaikan rumah



PASAL 38

Ayat (1)
untuk mendapatkan
pembiayaan perumahan
Peserta harus memenuhi
persyaratan

- Mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan
- Golongan masyarakat berpenghasilan rendah
- Belum memiliki rumah
- Menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama atau perbaikan rumah pertama

PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat ada 12,7 juta keluarga belum memiliki rumah dan mayoritas mereka ini merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Ada 44 persen rumah-rumah di Indonesia belum masuk rumah layak huni.

Harga tanah dan rumah terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, bahkan generasi muda terutama milenial dan gen Z dikhawatirkan tak mampu untuk memiliki rumah karena harganya yang selangit. Fenomena ini disebut dengan istilah millenial generation homeless.

Permasalahan backlog ini perlu untuk segera diatasi karena akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hunian layak merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No.25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat





Oleh: Trubus Rahardiansyah Pengamat Kebijakan Publik

apera diberikan tugas untuk menyalurkan pembiayaan rumah berbasis simpanan dengan prinsip gotong royong. Namun justru itulah, program Tapera menuai penolakan dari khalayak luas. Bagaimana tidak, pemerintah ingin Tapera diterapkan karena jumlah backlog di Indonesia mencapai 7.5 juta unit pada 2015, sementara Tapera baru disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada 2016.

Dengan ditekennya PP
No.21/2024, pekerja dan pekerja
mandiri diwajibkan mengikuti dan
menyetorkan iuran Tapera yang
dipotong 3 persen dari gajinya.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan
(2), pekerja akan menanggung 2,5
persen iuran Tapera, sementara
0,5 persen ditanggung oleh
pemberi kerja. Sementara pekerja
mandiri diwajibkan membayar
penuh 3 persen iuran Tapera dari
penghasilannya.

Tapera sebaiknya dibatalkan, karena hanya cocok diskemakan Dalam mengatasi backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat, ppemerintah lantas mewacanakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang secara berkelanjutan dengan pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau.

Kewajiban iuran dinilai akan memberatkan masyarakat, khususnya pekerja di bidang swasta. Perlu ada kajian lebih dalam mengenai Tapera

untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri. Namun, jika iuran Tapera ingin dikaji ulang, maka negara harus masuk berkontribusi. Misalnya, iuran 3 persen dari gaji untuk pekerja swasta, itu negara harusnya berkontribusi 2 persen dan karyawan cukup membayar 1 persen saja.

Selama ini, pemerintah dianggap gagal menjamin pengelolaan uang aparatur negara. Contohnya, kasus korupsi Asabri, Jiwasraya, dan Taspen yang habis seluruhnya. Apalagi, cuma Tapera, negara dinilainya tidak punya kekuatan untuk menjamin terwujudnya perumahan yang dijanjikan.

Jika ingin dilanjutkan, iuran Tapera juga harus jelas peruntukannya. Disarankan, iuran Tapera diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hitung-hitungannya harus jelas dan berbeda antara untuk orang miskin dan yang kaya, sehingga tidak dicampuradukkan. Juga harus

ada kepastian dapat rumah, sesuai domisili atau KTP-nya.

Kemudian untuk pekerja mandiri atau freelance, iuran ditanggung negara seluruhnya. Adapun untuk WNA (warga negara asing) menurutnya tidak perlu dilibatkan. Solusi lain jangan memasukkan pekerja swasta, pekerja mandiri, dan WNA. Iuran Tapera juga bisa bersifat opsional.

Kewajiban iuran dinilai akan memberatkan masyarakat, khususnya pekerja di bidang swasta. Perlu ada kajian lebih dalam mengenai Tapera yang hanya diwajibkan bagi ASN, TNI-Polri. Mengingat jika dibebankan kepada pekerja swasta juga, akan ada kerepotan yang dirasakan oleh pekerja swasta.

Khususnya ketika pekerja swasta harus terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). maka otomatis jadi pengangsur mandiri, karena tidak ditanggung perusahaan. Negara harus memikirkan dampak yang terjadi dari kebijakan kewajiban iuran Tapera tersebut. Lainnya, terkait PP No.21 ini, seolah-olah negara ingin mengumpulkan pundi-pundi dana masyarakat, dengan tak jelas, apakah bisa mempunyai rumah atau tidak.

Belum lagi dengan penolakan yang terjadi, jika iuran tersebut bersifat wajib, apakah ada sanksi bagi masyarakat yang menolak. Tidaklah etis jika pemerintah sampai memaksa rakyatnya. Artinya, memang idealnya khusus untuk pekerja swasta atau mandiri itu sifatnya opsional atau mandatori supaya tidak menimbulkan kegaduhan.

Pro Kontra *Starlink*Keadilan dan Kedaulatan Dipertanyakan

Layanan internet
'jalur langit' besutan
perusahaan Elon
Musk resmi menghiasi
persaingan provider
internet di Indonesia.
Hadirnya Starlink di
tanah air memicu pro
dan kontra dari sejumlah
kalangan, termasuk para
anggota dewan.

su keamanan data dan kedaulatan digital berhembus di berbagai media massa pasca Starlink resmi rilis di Indonesia pada April 2024 lalu. Dalam industri digital, data merupakan hal yang sangat penting sekaligus rentan untuk disalahgunakan. Isu jual-beli data hingga dugaan menjadi senjata dalam perang siber antarnegara.

Anggota Komisi VI DPR RI
Harris Turino ikut menyoroti soal
kedaulatan data dalam negeri. Dia
mempertanyakan kepada Dirut PT.
Telkom tentang ancaman kedaulatan
data yang dikhawatirkan oleh banyak
pihak. "Beberapa pihak menyatakan,
Starlink langsung mentransmisikan
datanya ke cloud-nya milik Elon
Musk, apakah ini benar? Apakah
mereka tidak menggunakan gateway
ke Indonesia dulu?" tanya politisi
F-PDI Perjuangan itu di Jakarta, akhir
Mei lalu.

Pertanyaan Harris tentu bukanlah tanpa sebab, apalagi nama Elon Musk



Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino saat mengikuti Rapat dengan Dirut PT. Telkom.

dan Starlink sempat terseret dalam pusaran perang Rusia-Ukraina sejak 2022. Peristiwa ini bermula pada Februari 2022 atau dua bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina, ketika Ukraina meminta Starlink mengaktifkan layanan internet di negara tersebut menggantikan Viasat karena situasi perang.

Untuk konteks Indonesia, konsep kedaulatan digital sudah tertuang dalam sejumlah aturan, seperti UU No.19/2016 tentang ITE, UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan PP No.71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Padahal, kan, kita mensyaratkan kedaulatan data ada di Indonesia. Nah, kami minta dari Telkom bisa mengelaborasi ini lebih lanjut, sehingga kami di Komisi VI, bisa juga ikut membantu Telkom demi kepentingan Indonesia," tutur Harris. Konsep kedaulatan digital ini mencakup kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Berbeda dari kebanyakan penyedia layanan jasa internet di tanah air, Starlink yang dikembangkan oleh SpaceX ini memanfaatkan satelit-satelit yang berada dekat dengan permukaan bumi atau Low Earth Orbit (LEO). Mengandalkan konstelasi ribuan satelit kecil di orbit rendah untuk mentransmisikan data

dengan kecepatan tinggi, Starlink memiliki misi menyediakan akses internet yang cepat dan handal, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh kabel serat optik.

Dengan kecanggihan dan segala penawaran yang dihadirkan oleh Starlink, industri layanan internet dalam negeri pun dibuat siaga tak terkecuali perusahaan plat merah yang menawarkan layanan serupa. Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengingatkan PT Telkom Indonesia agar mengantisipasi masuknya provider penyedia internet berbasis satelit seperti Starlink ke Indonesia.

"Bagaimana Telkom atau anak perusahaan seperti Telkomsel dan Indihome mengimbangi penyedia jaringan dari luar negeri ini?" ujar Rudi di Jakarta, awal Juni lalu. Politisi Fraksi Partai NasDem ini berpendapat, dengan masuknya Starlink ke Indonesia tentu akan menjadi tantangan bagi BUMN telekomunikasi tersebut. Terlebih, Starlink dinilai dapat menyediakan koneksi internet yang lebih cepat dan berbiaya lebih rendah.



Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun.

Rudi pun mewanti-wanti
Telkom agar tak ketinggalan
dengan masuknya teknologi baru.
la khawatir dengan persaingan
teknologi ini Telkom tak mampu
mengimbangi, sehingga produknya
tak lagi dipakai masyarakat. "Ini saya
ingatkan, jangan sampai Telkom
kalah saing nantinya. Jangan
sampai Telkom hilang pendapatan,
karena mereka menawarkan yang

lebih canggih sekaligus murah," tukas Rudi.

Setali tiga uang, Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah juga memberikan perhatian bagi persaingan usaha penyedia layanan internet di dalam negeri. Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut dengan gamblang menyambut baik hadirnya Starlink. Namun, ia menekankan agar prinsip keadilan harus tetap ditegakkan, khususnya bagi provider internet lokal.

Rizki bahkan sempat mengaitkan kehadiran Starlink dengan upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan layanan internet cepat dan murah di berbagai daerah di Indonesia. Ia mempertanyakan dampak hadirnya Starlink apakah dapat menekan anggaran Kemenkominfo.



Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah

RAPBN 2025 Untuk Hadapi Tantangan Global

Sembilan fraksi di DPR RI telah menyetujui pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Persetujuan ini disampaikan masing-masing juru bicara fraksi pada rapat Paripurna DPR RI, Selasa (28/5/2024) lalu.

raksi PDI Perjuangan memberikan penekanan terhadap proses penyusunan RAPBN 2025 yang dilakukan pada masa transisi. Disampaikan Edy Wuryanto, pembahasan KEM-PPKF 2025 seharusnya diarahkan untuk beberapa hal, antara lain menjaga kesinambungan penyelenggaraan tugas-tugas negara hingga memperkuat ruang fiskal bagi pemerintahan baru.

"Pokok-pokok kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat ruang fiskal bagi pemerintahan baru, sehingga memiliki ruang yang luas untuk dapat menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) oleh pemerintah baru," ujar Edy.

Fraksi Partai Golkar menilai penyusunan APBN merupakan kunci dari keberlanjutan serta kesinambungan pembangunan serta mengapresiasi masuknya program presiden terpilih dalam KEM PPKF 2025 ini.

"Fraksi Partai Golkar mengapresiasi dimasukkannya visi dan misi, serta program-program unggulan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2025. Hal ini penting dilakukan agar pemerintahan yang akan datang dapat langsung melaksanakan program-programnya dengan dukungan.anggaran yang mencukupi," kata Dewi Asmara, saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar atas KEM-PPKF RAPBN 2025.

Terkait target pertumbuhan ekonomi yang berada pada rentang

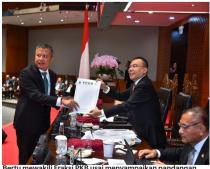
5.1-5.5 persen, hampir seluruh fraksi menilai bahwa rentang tersebut cukup realistis dan ditetapkan dalam kehati-hatian lantaran kondisi global yang masih tak menentu, seperti disampaikan Fraksi Gerindra. Meski begitu dirasa masih terbuka ruang akselerasi untuk mencapai angka yang lebih tinggi, seperti Fraksi PKB yang mengusulkan target pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh angka 5,7 persen.

"F-PKB menilai bahwa meskipun perekonomian global masih penuh tantangan, namun terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan, sehingga menjadi nilai yang positif bagi perekonomian nasional. Terlebih, secara fundamental perekonomian, Indonesia di tahun 2025 diperkirakan cukup solid. Hal itu tentu menjadi modal yang cukup baik dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi

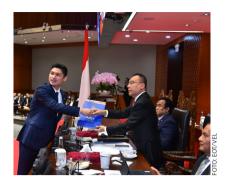




Dewi Asmara, saat menyampaikan pandangan Fraksi Par Golkar atas KEM-PPKF RAPBN 2025. Foto: Kresno/vel



Bertu mewakili Fraksi PKB usai menyampaikan pandang atas KEM-PPKF RAPBN 2025. Foto: Kresno/vel



Rizki Aulia Nata Kusumah saat membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat.



Muhammad Aras mewakili Fraksi PPP usai menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF RAPBN 2025.



Charles Meikyansyah mewakili Fraksi Partai NasDem usai menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF RAPBN 2025.



M. Nasir Jamil mewakili Fraksi PKS saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar atas KEM-PPKF RAPBN 2025.

Indonesia. Maka, F-PKB mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3-5,7 persen," tutur Bertu Merlas mewakili Fraksi PKB.

Charles Meikyansyah mewakili Fraksi Partai NasDem menyampaikan bahwa optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia berkaitan dengan tuntutan untuk lepas dari jeratan Middle Income Trap dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tuntutan tersebut setidaknya tertuang dalam skenario pertumbuhan ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6-6,1 persen.

Terkait dengan inflasi 2025, pemerintah memproyeksikan inflasi terjadi pada kisaran 1,5-3 persen. Fraksi partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar mampu memitigasi risiko terhadap kondisi yang memicu inflasi di 2025. Diantaranya fluktuasi harga pangan dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang akan memicu inflasi impor.

"Terkait fluktuasi harga pangan, Pemerintah harus mewaspadai Fluktuasi harga yang sifatnya seasonal akibat Hari Besar Keagamaan Nasional dan gangguan cuaca sehingga tidak menimbulkan kepanikan masyarakat dan mempengaruhi angka ekspektasi inflasi.Pemerintah melalui TPIP dan TPID harus menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dengan menjaga ketersediaan pasokan dan lancarnya distribusi," sebagaimana dituturkan Rizki Aulia Nata Kusumah saat membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat.

Pada KEM-PPKF RAPBN 2025, pemerintah mematok belanja negara pada kisaran 14.59 - 15,18 persen terhadap PDB. Fraksi PAN menyampaikan bahwa peningkatan ini harus diiringi dengan penguatan collecting more, spending better dan innovative financing. Selain meningkatnya anggaran untuk belanja, kisaran defisit fiskal dalam KEM-PPKF 2025 juga melebar menjadi ke kisaran 2,45-2,82 persen dari PDB, jauh di atas target sasaran defisit fiskal 2024 sebesar 2,29 persen. Fraksi PPP menilai, hal ini menjadi tantangan yang harus diemban pemerintahan selanjutnya.

"Defisit fiskal yang semakin lebar, harus dipakai untuk program-program prioritas yang sifatnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Serta dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Terutama program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor UMKM," tutur Muhammad Aras mewakili Fraksi PPP.

Dana desa pun tak luput dari perhatian anggota dewan, seperti yang disampaikan M. Nasir Jamil mewakili Fraksi PKS. Fraksinya mendorong dan mendukung peningkatan Dana Desa di 2025 dari sebelumnya sebesar Rp71 triliun di 2024 dengan disertai penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta pendampingan yang berkala dan berkelanjutan dari Pemda maupun pemerintah pusat.

Fraksi PKS mengingatkan beberapa hal terkait Dana Desa yakni potensi dan permasalahan yang berbeda di setiap desa, adanya UU No.3/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.6/2014 tentang Desa, terutama beberapa hal yang berhubungan dengan alokasi anggaran baru, integrasi data keuangan desa berbasis elektronik, dan penguatan pengelolaan keuangan desa dalam pemberdayaan ekonomi desa.

Dengan disetujuinya KEM-PPKF 2025 oleh sembilan fraksi yang ada di DPR RI, maka DPR RI melalui fungsi anggaran akan segera duduk bersama pemerintah untuk melakukan penyusunan RAPBN 2025. — tn/mh

Revisi UU Kelautan Menjaga Potensi Kekayaan Laut Indonesia

Luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta km². Di laut seluas itu, tentu menyimpan kekayaan yang luar biasa. Di sinilah butuh regulasi yang memadai untuk menjaga potensi kekayaan laut nusantara.

ejak akhir tahun 2023, Panitia Khusus (Pansus) RUU Kelautan mulai intens membahas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (RUU Kelautan). Ada dua substansi pokok yang menjadi fokus pembahasan RUU Kelautan. Pertama, penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Penguatan itu berupa penajaman fungsi dan wewenang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan yang menjadi yurisdiksi Indonesia. Selain itu, perlu ada penggabungan lembaga antara Bakamla dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemenhub.

Kedua, penguatan peran
KKP untuk melakukan sinergi
antarkementerian dalam aspek
tata kelola kelautan. Dalam
pembahasannya, Pansus RUU
Kelautan dan pemerintah sepakat
Indonesia perlu memiliki coast
guard demi menjaga keamanan,
keselamatan, dan penegakan hukum
di laut. Untuk itu, Ketua Pansus
Kelautan DPR RI Utut Adianto menilai,
keberadaan Indonesian Coast Guard

66

Penajaman fungsi dan wewenang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan yang menjadi yurisdiksi Indonesia.

Utut Adianto Ketua Pansus Kelautan DPR RI

jadi salah satu pondasi perubahan dalam UU Kelautan yang sudah sepuluh tahun berlaku tersebut.

"Memang kalau idealnya Bakamla ini punya undang-undang sendiri. Kalau sekarang ini, kan, Bakamla nempel di Undang-Undang Kelautan. Kalau (persoalan) kelautan, ya yang punya wilayah kewenangan terbesar, ya Menteri Kelautan dan Perikanan," pandang Utut kepada Parlementaria.

Adapun, usulan mengenai keberadaan coast guard ini sebelumnya merupakan arahan Presiden Joko Widodo melalui surat Nomor R-35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi kesan dualisme coast guard di Indonesia, sehingga perlu penegasan posisi badan atau entitas baru sebagai Coast Guard Indonesia dalam revisi UU Kelautan ini.



Ketua Pansus RUU Kelautan Utut Adianto saat memimpin Rapat Kerja di Ruang Pansus B.

Selain penguatan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum wilayah perairan, Wakil Ketua Pansus RUU Kelautan, Slamet mengatakan, kepastian hukum terhadap berbagai permasalahan tata kelola kelautan, terutama sinergi dan koordinasi antara instansi/lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di laut masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Pasalnya, UU Kelautan yang ada belum bisa memberikan kepastian terhadap hal tersebut.

"Tantangan dalam tata kelola kelautan yang dihadapi tidak sederhana karena kompleksitas tataran koordinasi, kewenangan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya laut. Hal tersebut agar pemanfaatan sumber daya laut dapat lebih maksimal, serta untuk membangun sistem keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut." kata Slamet.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, kekayaan alam yang terkandung di dalam laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karenanya, dibutuhkan regulasi atau kebijakan yang tepat untuk menangani hal tersebut.

"Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama,



Wakil Ketua Pansus RUU Kelautan, Slamet, saat Kunjungan Kerja Pansus RUU Kelautan.

di antaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia," jelas Slamet.

Slamet menambahkan, sistem penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai K/L yang secara sistem dikenal dengan istilah "Multi Agency Single Task". Namun, penerapan sistem Multi Agency Single Task masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Di sisi lain, masih tumpang tindihnya pengelolaan kelautan, juga menjadi perhatian Pansus RUU Kelautan. Wakil Ketua Pansus RUU Kelautan. Christina Aryani menegaskan Pansus RUU Kelautan nantinya juga akan menindaklanjuti berbagai aturan yang tumpang tindih soal pengelolaan kelautan. Salah satunya mengenai wewenang antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP).

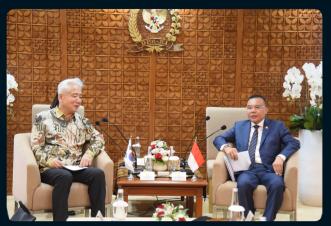
Menurutnya, kedua lembaga itu memiliki payung hukum masingmasing dalam menjalankan wewenangnya. Oleh sebab itu, Christina mengatakan tumpang tindih itu akan segera dibahas bersama anggota pansus yang lain. "Khusus terkait dengan kelautan ini atau spesifik keamanan laut itu memang ada (tumpang tindih), tapi kan tadi sudah disampaikan juga kalau kita memetakan memang ada kewenangan yang masih bisa dilakukan oleh instansi tersebut," ujarnya. • bia/mh



Wakil Ketua Pansus RUU Kelautan Christina Aryani saat Kunjungan Kerja Pansus RUU Kelautan.













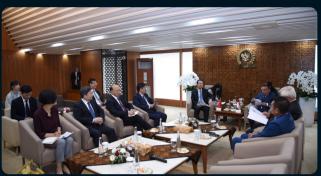
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, saat menerima delegasi parlemen dari Rumania di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024). FOTO: AZKA/ANDRI







Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima Delegasi Komisi Luar Negeri Lembaga Legislatif Tertinggi Republik Rakyat Tiongkok (National People Congress/NPC) di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024). FOTO: GERALDI/ANDRI







Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady memimpin pertemuan dengan delegasi DPRD Kabupaten Janeponto, Suleawesi Selatan, Selasa (4/5/2024). FOTO: OJI/ANDRI





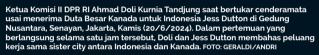




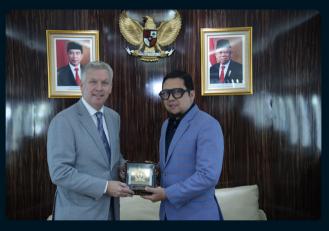


























Rapat Kerja Komisi I DPR RI yang di pimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengesahkan dan membentuk Panitia Kerja (Panja) 5 RUU Ratifikasi Bidang Pertahanan Indonesia di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2024). FOTO: RUNI/ANDRI











Ketua GKSB Indonesia-Portugal Kris Dayanti didapingi beberapa Anggota DPR RI saat pertemuan bilateral dengan Duta Besar Portugal untuk Republik Indonesia Miguel de Mascarenhas De Calheiros Velozo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024). FOTO: MENTARI/ANDRI







Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menghadiri penyembelihan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 H, di halaman Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/6/2024). FOTO: FARHAN/ANDRI





akarta dipersiapkan menjadi sebuah kota bisnis setelah tidak lagi menjadi Ibu kota negara.
Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang menyebutkan, visi pembangunan Kota Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global.

Demi mewujudkan target ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta kini tengah merancang paras Kota Jakarta untuk 20 tahun ke depan. Semua kebijakan yang dibuat diharapkan dapat menyelesaikan isu strategis dan menjawab tantangan perkotaan masa depan.

Mulai dari peningkatan kualitas transportasi publik, percepatan akses infrastruktur dasar, penyediaan hunian terjangkau, peningkatan kualitas lingkungan, perwujudan estetika kota, serta penyempurnaan terhadap standar pembangunan dan tingkat kelayakan hidup.

Jakarta dituntut mampu menjadi kota yang efisien dengan segala fasilitasnya, seperti kemudahan transportasi, kebersihan, pelayanan, dan lain sebagainya. Untuk itu, ekosistemnya juga harus segera disiapkan dev/mh























ia adalah Wisnu Wijaya
Adi Putra. Seorang
aktivis dan pengusaha
yang kini menjadi
anggota DPR RI dari
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dia duduk di Komisi VIII DPR RI yang
diantaranya membidangi tentang
keagamaan, sosial, kebencanaan,
dan permberdayaan perempuan dan

Karakter berani dan kritis Wisnu Wijaya salah satunya tercermin saat mengoreksi tingginya biaya haji 1445H/2024M yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji. Ia dengan tegas menolak nominal biaya haji yang semula disodorkan oleh Kementerian Agama sebesar Rp105 juta/jemaah pada 17 November 2023. Penolakannya itu menjadi perbincangan luas karena haji merupakan bagian dari hajat hidup masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia.

Menariknya, pria yang lahir pada 4 Oktober 1978 ini memberikan analisa detil terkait solusi-solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan biaya haji, sehingga menjadi lebih murah. Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha, Wisnu mencermati setiap detil komponen biaya haji hingga tiba pada kesimpulan bahwa ada banyak komponen pembiayaan haji yang terlalu mahal dan seharusnya bisa ditekan.

Mulai dari desakan untuk menekan biaya penerbangan dengan cara membuka kompetisi antarmaskapai. Kemudian usulan perubahan pola konsumsi dengan pemberian uang tunai kepada jemaah untuk menghindari makanan katering yang terbuang mubazir dan agar lebih hemat. Selain itu, dia juga menyarankan agar layanan katering dilakukan dengan skema open tender.

Selanjutnya, Wisnu juga mengusulkan agar durasi haji dipersingkat dari 40 hari menjadi 35



Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya Adi Putra saat interupsi di Rapat Paripurna DPR RI.

66

Sejak menjabat sebagai Anggota DPR pada pertengahan 2023, setelah ada Pergantian Antar-Waktu (PAW) 12 September 2023, dia menjadi Anggota DPR yang dinilai rajin turun ke tengah masyarakat di daerah pemilihan Jawa Tengah I

sampai 30 hari. Wisnu menilai hal itu dapat menekan pengeluaran dari komponen perhotelan, konsumsi, transportasi, dan biaya hidup jemaah selama di Arab Saudi hingga ratusan miliar.

Benar saja, pada 22 November 2023, atau kurang dari sepekan sejak usulan awal disampaikan Kementerian Agama ke Komisi VIII DPR, pemerintah merespons kritik yang Wisnu sampaikan dengan menurunkan usulan biaya haji yang semula Rp105 juta per jemaah menjadi Rp 93,4 juta per jemaah. Sementara, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan langsung kepada jemaah rata-rata sebesar Rp56,04 juta. Meski demikian, Wisnu tetap bersikeras agar biaya tersebut bisa kembali diturunkan, sehingga lebih terjangkau dan rasional bagi jemaah.

Apa yang dilakukan Wisnu yang merupakan kandidat Ph.D dari Asia e-University Malaysia ini, benarbenar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena secara langsung meringankan beban yang akan ditanggung calon jamaah haji di tahun 2024.

Apakah itu saja yang telah dilakukan Wisnu untuk melayani kepentingan masyarakat? Tidak. Sejak menjabat sebagai Anggota DPR pada pertengahan 2023, setelah ada Pergantian Antar-Waktu (PAW) 12 September 2023, dia menjadi Anggota DPR yang dinilai rajin turun ke tengah masyarakat di daerah pemilihan Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Kota







Wisnu Wijaya berfoto bersama dengan keluarganya di Ruang Paripurna.



Anggota DPR RI Wisnu Wijaya saat menghadiri acara di Semarang.

Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal.

Dengan terjun langsung ke masyarakat, ia mengetahui betul apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan warga. Ada yang mengeluhkan soal air bersih, infrastruktur jalan, pekerjaan, bantuan sosial, pendidikan usia dini, hingga soal beasiswa. Keluhan, masukan, dan saran yang ia terima kemudian dirumuskan dalam 8 Program Advokasi Wisnu Wijaya untuk ditindaklanjuti melalui skema program aspirasi mitra Komisi VIII maupun program aspirasi DPR.

Setidaknya ada 16 rincian besar amanah yang sudah ditunaikan selama menjabat sebagai wakil rakyat di Jawa Tengah I sepanjang 2023. Semuanya langsung menyasar ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.

Di antaranya penyaluran bansos, alat bantu disabilitas, dan bantuan

kewirausahaan senilai lebih dari Rp275 miliar. Bantuan PKH untuk warga Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga lebih dari Rp60 miliar. Bantuan logistik bagi korban bencana alam lebih dari Rp500 juta. Lebih dari Rp200 juta bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan banjir di Semarang.

Kemudian bantuan langsung tunai untuk lebih dari 1.000 guru ngaji dan ustaz. Sebanyak lebih dari 200 instansi/lembaga menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pesantren, madrasah, dan TPQ, dan lebih dari 50 kiai telah menerima Program Kita Jaga Kiai.

Belum lagi ada 384 KK menerima bantuan bedah rumah, dua titik pembangunan infrastruktur jalan, 150 lebih siswa SLTA menerima beasiswa, 100 beasiswa kuliah bagi mahasiswa Unissula. Kemudian pembangunan lapangan sepakbola di desa Butuh, Kabupaten Semarang. Tidak hanya itu, ada lagi satu titik Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Semarang, 1 unit katrol alat bantu penarik kapal nelayan, serta 3 unit ambulans dan mobil siaga bencana.

Dengan banyaknya bantuan yang diberikan bagi warga Jateng 1, seolah Wisnu menjadi "genter" atau wasilah yang menyalurkan program dari pemerintah pusat kepada masyarakat kecil yang membutuhkan. Disamping aktif membela kepentingan rakyat di dalam negeri, amanah sebagai anggota DPR RI juga dimaksimalkan Wisnu untuk terlibat dalam pembelaan atas isu kemanusiaan global.

Melalui kewenangan diplomasi, Wisnu mengajak parlemen dunia menekan Israel atas agresi militernya ke Palestina sejak Oktober 2023. Salah satunya dia lakukan saat pertemuan dengan Parlemen Italia dalam rangkaian kegiatan diplomasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI di Roma, Italia, 12-18 November 2023.

Saat itu, delegasi Indonesia disambut oleh Wakil Ketua DPR Italia, Giorgio Mule, Wakil Ketua Hubungan Luar Negeri Parlemen Italia, Paolo Formentini, dan Presiden Grup Kerjasl sama Parlemen Indonesia-Italia, Giovanna Iacono. Selain memperkuat hubungan bilateral antarparlemen kedua negara, kunjungan tersebut juga membahas isu global terkini. Salah satunya terkait krisis kemanusiaan akibat eskalasi konflik yang terjadi di Gaza, Palestina.

"Kami mengajak parlemen Italia mendorong pemerintahnya melakukan segala hal yang diperlukan untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Kami tegas menolak segala bentuk kejahatan yang melanggar nilai HAM serta mendorong dilakukannya dialog antarpihak dalam memecahkan masalah."

Jauh sebelum menjadi politisi, masa muda Wisnu juga tepat dijadikan panutan bagi mereka yang ingin merintis usaha. Jika saat ini dia dikenal sebagai Komisaris PT Herba Salam sekaligus pendiri dan pemilik PT Halal Network International, ternyata jauh sebelum kesuksesannya sekarang, dia pernah mengalami jatuh bangun saat merintis usaha.

Wisnu pernah hampir diseret ke penjara akibat ditipu oleh rekan bisnisnya sampai miliaran rupiah sehingga membuat investor berang. Sebelumnya, perusahaan yang kini dia kelola pernah terpaksa tiga kali berganti nahkoda hingga akhirnya mulai stabil pada tahun 2012. Kesuksesan Wisnu tak pernah terlepas dari sikap semangat dan keinginan kuat yang dimilikinya.

Selain itu, Wisnu ternyata mempunyai satu resep ciamik yang didapatkannya dari kedua orangtuanya. Menurutnya, pesan kedua orangtua adalah kunci utama dirinya sukses hingga sekarang. Yaitu kejujuran! Dengan pengalamannya



yang dimiliki, ia tak ingin sukses sendirian. Entrepeneur yang juga berpartner bisnis dengan Sandiaga Uno (Menparekraf) sejak lama ini, aktif membina 700-an UMKM yang tersertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) di Indonesia dan negara lain.

Putra Semarang kelahiran Mugas tersebut juga mempunyai binaan usaha yang hampir merata se-Jawa Tengah dan Indonesia. Bersama tim founder PT HNI, ia juga mendirikan pabrik bersertifikasi internasional di Jawa Tengah dan berhasil mengakuisi perusahaan lain yang kolaps di DKI dan Jawa Barat dengan cara menyehatkan manajemen dan produksinya.

Saat ini Wisnu Wijaya masih dan akan terus aktif berkontribusi bagi masyarakat Jawa Tengah. Ia juga terlibat aktif sebagai Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2024 dengan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Pansus Haji pasca-penyelenggaraan yang menunjukkan banyak pelanggaran undang-undang.

Hal itu mulai dari persoalan katering, penerbangan pesawat, hingga persoalan yang paling fatal, yaitu pembagian alokasi kuota jemaah haji reguler dengan kuota haji plus. "Kalau lingkupnya hanya Kementeriaan Agama saja maka cukup dibentuk Panitia Kerja atau Panja oleh Komisi VIII. Tapi karena melibatkan banyak isu lintas kementerian, maka tidak ada pilihan lain kecuali membentuk Panitia Khusus atau Pansus,"

Pasca keputusan Pemilu 2024 kemarin yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi terpilih sebagai Anggota DPR RI Periode 2024-2029, maka terdapat peluang untuk dirinya maju sebagai Wali Kota Semarang. Meskipun demikian, ia masih menunggu keputusan DPP PKS dan partai-partai lain yang akan mengusungnya menjadi orang nomor satu di Kota Semarang tersebut.

Meninjau Produksi Alutsista

Komisi I DPR RI meninjau produksi alat utama sistem senjataan (Alutsista) yang diproduksi perusahaan swasta PT. Sentra Surya Ekajaya (SSE) di Kota Tangerang. Produk Alutsista ini untuk memenuhi kebutuhan pertahanan di dalam negeri secara mandiri.



 $Anggota\ Komisi\ I\ DPR\ RI\ TB\ Has anuddin\ saat\ melakukan\ kunjungan\ kerja\ spesifik\ di\ Kota\ Tangerang.$

ecara khusus, Komisi I
DPR melihat dari dekat
produksi Alutsista ini
untuk mengetahui
pengembangan produk
pertahanan modern, Di PT SSE
itu juga ada produk kendaraan
militer yang digunakan TNI. "Tadi
kami juga sudah diskusi banyak,
dan menilai PT SSE ini merupakan
sebuah kebanggaan untuk kita
semua. Khususnya terhadap peran
PT Sentra Surya Ekajaya (SSE) dalam
mendukung kebutuhan Alutsista TNI,"
ucap TB Hasanuddin.

PT SSE sendiri adalah salah satu BUMS industri pertahanan yang merancang dan memproduksi berbagai kendaraan militer seperti kendaraan tempur (Ranpur), kendaraan taktis (Rantis), dan kendaraan khusus (Ransus). Produkproduk tersebut, seperti tipe P2 Komando, P2 APC, dan P6 ATAV, sudah digunakan oleh TNI, khususnya Korps Marinir.

PT SSE sendiri membutuhkan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Alutsista secara mandiri. Komisi I DPR pun berkomitmen mendukung penggunaan Alutsista buatan dalam negeri. Dukungan ini untuk mendukung sistem pertahanan di

bidang otomotif, memperdayakan sumber daya manusia (SDM), serta memajukan industri dalam negeri.

Sementara di Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav) Padalarang, Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mendukung pengembangan konsep perang modern TNI AD melalui penambahan anggaran kavaleri.

Di era modern, Batalyon
Kavaleri harus mengintegrasikan
teknologi sebagai alat serangan,
terutama di udara dan darat.
"Kita berharap pemerintah hari ini
maupun pemerintah ke depan terus
mendukung Pusat Kesenjataan
Kavaleri (Pussenkav) dan Pusdikkav,
agar peralatan kita bisa semakin baik,
semakin canggih, dan selalu siap
untuk pertempuran di zaman modern
ini," ujarnya baru-baru ini.

Selain itu, dalam pertemuan Pussenkav dan Pusdikkav juga menyampaikan kendala yang dihadapi, yakni keterbatasan pada alutsista, sapras, logistik, dan anggaran. Komisi I pun mendukung penambahan anggaran dan akan



Di era modern, Batalyon Kavaleri harus mengintegrasikan teknologi sebagai alat serangan, terutama di udara dan darat.

TB Hasanuddin Anggota Komisi I DPR RI



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Pusat Psikologi TNI (Puspsi TNI) di Bekasi.

menyampaikan temuan ini saat rapat kerja bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

"Kami dari Komisi I tentu melihat masih banyak sebetulnya dukungan yang diperlukan. Tentu kami akan menyuarakan hasil masukan, paparan, dan juga temuan lapangan yang kami lihat pada saat raker nanti dengan Menhan dan Panglima TNI," tutupnya.

Sementara di Bekasi, delegasi Komisi I DPR RI yang dipimpin ketuanya Meutya Viada Hafid melakukan kunjungan ke Pusat Psikolog TNI (Puspi TNI) di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/6) lalu. Kunjungan ini untuk mengetahui peran Puspi TNI dalam memberikan dukungan layanan psikologi bagi prajurit TNI. Pasalnya, dalam Jurnal Humanitas tahun 2023, diketahui tingginya tingkat stres kerja di kalangan anggota TNI, yang dapat memengaruhi performa instansi tersebut.

Karenanya, Puspsi TNI memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan psikologi prajurit TNI khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM TNI maupun masyarakat sipil. Dalam kesempatan itu, Meutya pun mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana Puspsi TNI memetakan kerawanan gangguan psikologis di lingkup kerja TNI serta bentuk antisipasi terhadap gangguan tersebut.



 $Wakil \, Ketua \, Komisi \, I \, DPR \, RI \, Teuku \, Riefky \, Harsya \, saat \, kunjungan \, spesifik \, Komisi \, I \, DPR \, RI \, ke \, Pusdikkav \, Padalarang.$

Komisi II DPR Pertanyakan Mundurnya Kepala IKN

Pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) banyak dipertanyakan publik, termasuk Komisi II DPR RI. Apa latar masalah pengunduran diri itu, belum diketahui sepenuhnya oleh Komisi II DPR.



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI di Palu, Sulawesi Tengah.

Ketua Komisi II DPR
RI Ahmad Doli Kurnia
mengaku belum
mengetahui secara pasti
pengunduran diri Kepala
Otorita IKN. Namun, ia menyatakan
bahwa pihaknya mengagendakan
pertemuan dengan pihak-pihak
terkait untuk membahas isu
pengunduran Kepala IKN ini.

"Saya belum tahu persis ya,

Kepala Otorita IKN mengundurkan diri. Namun, nanti di Jakarta akan diadakan agenda pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait, terutama otoritas IKN dan mungkin juga Menteri Sekretaris Negara. Kami ingin mendengarkan langsung apa yang sebenarnya terjadi," ujar Doli kepada Parlementaria di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (4/6/2024) lalu.

Doli menekankan bahwa yang paling mengetahui alasan pengunduran diri tersebut adalah Kepala Otorita IKN sendiri. Meskipun demikian, ia menilai bahwa selama ini kinerja otoritas tersebut sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah. "Sebenarnya, yang paling tahu soal mundur atau tidak mundurnya, serta alasan di balik itu

adalah Kepala Otorita IKN sendiri. Tapi saya melihat, terlepas dari apa alasan mundurnya, selama ini apa yang sudah dikerjakan oleh otoritas tersebut sudah sesuai dengan target yang ditentukan pemerintah," akunya.

Doli juga mengungkapkan bahwa tim di dalam Otorita IKN sudah terbentuk dengan cukup kuat, sehingga berbagai program dan proyek di IKN dapat berjalan dengan baik. Ia menyebutkan bahwa perkembangan IKN akan terus dipantau, terutama rencana pemerintah melaksanakan upacara bendera pertama kali di IKN pada 17 Agustus.

"Kami akan melihat perkembangan lebih lanjut pada tanggal 17 Agustus. Jika pemerintah benar-benar melaksanakan upacara bendera pertama kali di IKN, ini akan menjadi langkah maju untuk memastikan bahwa pusat pemerintahan ibu kota bisa segera berjalan dan pemindahannya terlaksana," tambahnya.

Doli menegaskan bahwa agenda tersebut akan menjadi momen penting untuk memastikan kelancaran pemindahan IKN dan keberlanjutan proyek IKN. "Kita harus memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana dan target, demi suksesnya pemindahan ibu kota negara. Ini adalah langkah penting untuk masa depan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia," pungkasnya.

Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, para anggota Komisi II DPR RI juga terkejut mendengar informasi Kepala IKN mundur. Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus berharap, pelaksanaan pembangunan di IKN tidak mangkrak. Sebab proyek di Penajam Paser Utara itu telah menjadi obsesi Presiden Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota negara yang baru, karena telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.

"Karena itu, saya berharap presiden segera menetapkan calon



Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II ke Makassar.

definitifnya supaya gerak langkah pembangunan itu segera maksimal lagi. Kalau cuma pelaksana tugas, yang melakukan tentu optimalisasinya berbeda dengan pejabat yang definitif itu," ujar Guspardi kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II ke Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/6/2024) lalu.

Presiden Jokowi sendiri telah menetapkan Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono sebagai Plt
Kepala Badan Otorita IKN dan
Wakil Menteri ATR/BPN Raja
Juli Antoni sebagai Plt Wakil
Kepala Badan Otorita IKN. Jokowi
menunjuk Basuki dan Raja Juli
untuk mempercepat realisasi
program pembangunan IKN
melalui penyelesaian persoalan
status tanah hingga pembentukan
pemerintah daerah khusus IKN.

Dijelaskan Guspardi, dua bulan yang lalu, Komisi II telah melakukan rapat dengan Badan Otorita IKN tersebut. Saat itu, tambah Guspardi, Badan Otorita IKN menyampaikan bahwa masih banyak persoalan IKN yang harus diselesaikan. Proyek yang harusnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2-3 bulan lagi, ternyata progress report-nya baru mencapai 40-60 persen.

"Bagaimana pun ini, kan, jadi beban moral bagi Kepala IKN (saat itu) untuk mempercepat proses pelaksanaan IKN itu. (Namun) di satu sisi, ada masalah-masalah yang ada di IKN, seperti ada pembebasan lahan, dan sebagainya. Ini dua kutub (masalah) yang menurut saya menjadi beban bagi IKN. Apakah ini penyebab mereka mundur atau bagaimana, tentu ini silakan tanya langsung kepada dua sosok yang mengundurkan ini," tutup politisi Fraksi PAN tersebut.

Sebelumnya, Menteri ATR/ BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ada 2.086 hektare lahan yang saat ini belum bisa dikatakan clear digunakan untuk pembangunan IKN. Dari 2.086 hektar tersebut, tidak semua menjadi prioritas. Namun, hanya beberapa yang menjadi prioritas. Pertama, lahan pengendali banjir sepaku seluas kurang lebih 2,75 hektar yang terdiri dari 22 bidang tanah. Kedua, lahan di lokasi yang akan menjadi pembangunan jalan tol akses IKN pada segmen 6A dan 6B seluas 44,6 hektar yang terdiri dari 48 bidang tanah. gys,rdn/mh

Menjaga Keamanan PON XII

Komisi III DPR RI secara khusus menyoal aspek keamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Provinsi Aceh Darussalam, yang akan dihelat pada September 2024. PON kali ini harus terselenggara dengan baik, karena berdekatan dengan Pilkada di bulan yang sama.

alam pertemuan dengan Polda Aceh, Komisi III DPR mendesak keamanan setempat menjaga integritas keamanan selama penyelenggaraan PON. Anggota Komisi III Hinca Panjaitan menyerukan, agar penyelenggaraan PON XII tidak dipersiapkan sekadarnya. PON XXI harus berintegritas dan berwibawa.

"PON ini adalah Olimpiade Indonesia. Sekali 4 tahun yang harus kita kelola dengan baik. Kita jaga integritas dan kewibawaan. Jadi kita serius menangani itu," ujar Hinca kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Komisi III di Banda Aceh, Aceh, Jumat (31/5/2024) lalu. Persiapan tentu perlu matang. Terlebih waktu penyelenggaraan PON dengan Pilkada berada pada waktu yang bersamaan, yaitu September 2024.

"Dan yang paling menarik adalah soal waktu. Jadi karena Pilkada seluruh Indonesia terjadi pada waktu yang bersamaan, Agustus pendaftaran sampai September, coblosnya November," jelas politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Persiapan pengamanan PON penting sekali. Maka, Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk membahas langsung persiapan PON dengan Polda Aceh.

Persiapan venue-nya pun belum siap sepenuhnya. Hinca menekankan kembali kesiapan bagi Sumut dan Aceh untuk menyelenggarakan PON ini. Ia pun menyatakan, bila



 $Anggota\ Komisi\ III\ DPR\ RI\ Hinca\ Panjaitan\ saat\ mengikuti\ pertemuan\ Kunjungan\ Kerja\ Komisi\ III\ di\ Banda\ Aceh.$

diperlukan pengunduran waktu penyeleanggaraan PON, bisa saja asalkan persiapannya jauh lebih baik. "PON di Jayapura juga ditunda. Itu sesuatu yang biasa saja, tapi siklus 4 tahunannya kita jaga," tutup Hinca.

Masih di Polda Aceh, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, optimistis kepolisian mampu mengatasi dan mencegah semua potensi gangguan jelang PON XXI. Ia menilai, PON adalah agenda nasional. Anggaran PON juga penting dibicarakan, agar Polda Aceh dan Sumatera Utara optimal merancang keamanannya. PON ini adalah Olimpiade Indonesia. Sekali 4 tahun yang harus kita kelola dengan baik. Kita jaga integritas dan kewibawaan. Jadi kita serius menangani itu

Hinca Panjaitan Anggota Komisi IV DPR RI



Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat mengikuti pertemuan dengan Polda Aceh dan Kanwil Kumham Aceh

la mengungkapkan, selamam ini kendala anggaran selalu jadi isu krusial. Dan hasil kunjungan kerja spesifik ini akan ditindaklanjuti pada rapat di DPR, sehingga agenda PON mendatang berjalan lancar. "Ya, nanti kami sampaikan kepada Kapolri atau Wakapolri agar bisa dipenuhi, karena PON ini akan berlangsung di bulan sembilan (September) yang akan datang," ujar politisi Fraksi PKS dari Dapil Aceh ini.

September mendatang
Indonesia akan menyelenggarakan
PON ke XXI. Kegiatan yang
direncanakan mulai pada 8
September 2024 tersebut,
membuka kompetisi olahraga yang
terdiri dari 33 cabang olahraga, 42
disiplin cabang olahraga, dengan
total 510 nomor pertandingan.
PON tersebut diperkirakan akan
diikuti 5.636 atlet dan 2.572 ofisial.
Pembukaan PON XXI sendiri akan
digelar di Komplek Olahraga Stadion
Harapan Bangsa, Banda Aceh.

Anggaran PON
juga penting
dibicarakan, agar
Polda Aceh dan
Sumatera Utara
optimal merancang
keamanannya.

Nasir Djamil. Anggota Komisi III DPR RI

Pada bagian lain, Nasir juga menyinggung topik lain di luar isu PON XXI. Ada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di wilayah hukum Aceh. Isu ini terkait pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh yang berindikasi TPPO. Ini merupakan tindak kejahatan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. "Terutama Aceh, (agar) tidak kelimpungan, ya kalau menangani mereka. Karena dalam Perpres itu disebutkan bahwa pemerintah daerahlah yang memberikan tempat tampungan, sementara pemerintah daerah punya pekerjaan lain yang harus mereka selesaikan," lanjutnya. Ia pun mewanti-wanti pemerintah pusat, agar tidak lepas tangan dan menyerahkan masalah ini kepada Pemda.

Nasir berharap, DPR dan pemerintah menggelar rapat koordinasi membahas masalah pengungsi Rohingya. Sehingga, tahun 2025 sudah ada solusi atas isu ini. "Jadi, karena mereka bergerombolan dan jumlahnya juga tidak sedikit, maka terjadilah apa yang disebutkan penyelundupan manusia. Bisa jadi ini bukan soal mereka bergerak, anggap aja dari Bangladesh ke Indonesia, dalam hal ini Aceh. Tapi, ini bagian dari sindikat penyelundupan manusia," jelas politisi Fraksi PKS dari Dapil Aceh ini.

Reklamasi Lahan Kritis Bekas Pertambangan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan saat memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI ke Wilayah Konsesi PT. Timah Tbk di Desa Kerakas, dan Desa Puput, Kecamatan Sungaiselan, Kabupater Bangka Tengah.

Reklamasi lahan kritis jadi perhatian serius Komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung. Di provinsi ini ada PT. Timah yang beroperasi dan sedang mempercepat reklamasi sebagai percontohan dengan melibatkan masyarakat.

akil Ketua
Komisi IV DPR RI
Budhy Setiawan
menyampaikan,
lahan kritis yang
luas tidak boleh dibiarkan berlamalama. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan
PT. Timah mengemban tanggung
jawab yang besar soal ini. Sebetulnya
sudah ada tim percepatan reklamasi
yang dibentuk dan harusnya
kegiatan reklamasi di Babel bisa

Mendesak ada regulasi yang mengatur persoalan reklamasi atas lahanlahan kritis bekas pertambangan.

Budhy Setiawan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dipercepat. Hal ini dikemukakan Budhi saat memimpin kunjungan kerja ke wilayah konsesi PT. Timah di Desa Kerakas dan Desa Puput, Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (5/6/2024) lalu.

"Kita lihat di sini lokasi percontohan untuk reklamasi yang dilakukan oleh PT Timah melibatkan kelompok masyarakat. Juga terlihat di sini sudah dari tahun 2021 mulai dilakukan penanaman akasia yang nilainya cukup tinggi. Tadi yang pertama kita lihat lokasi kerusakan akibat kegiatan pertambangan," ujarnya.

Dengan hasil tambang yang luar biasa, mestinya daya beli masyarakat juga tinggi. Tapi, di sini tidak. Kemudian, lahan juga ditinggalkan dalam kondisi rusak.



Anggota Komisi IV H.T.A. Khalid saat meninjau dampak banjir bandang karena meluapnya Sungai Batang Anai di Sumatera Barat

Politisi Partai Golkar itu mendesak ada regulasi yang mengatur persoalan reklamasi atas lahan-lahan kritis bekas pertambangan. Ini masalah bersama yang penyelesainnya harus dilakukan secara bersama melalui tim percepatan yang terdiri dari lintas kementerian.

"Kemudian kita dorong sampai terbit regulasinya. Setelah diterbitkan, regulasi itu bisa diimplementasikan di lapangan," tambahnya. Sekda Babel Fery Afriyanto mendukung pembentukan tim percepatan ini. Dengan tim percepatan ini, maka menurutnya, akan lebih baik, sebab rehab lahan kritis bisa cepat dilakukan.

Sementara itu, tim kunjungan kerja Komisi IV di Sumatera Barat, menyorot soal fungsi Sungai Batang Anai sebagai jalur air. Pasalnya, banjir bandang pernah terjadi di Sumbar pada Mei 2024 lalu. Selama ini, ada sekitar 159 keluarga yang membuka kita minta KLHK beserta pemerintah daerah melakukan pengkajian secara komprehensif, mulai dari atas sampai ke hilir.

H.T.A. Khalid Anggota Komisi IV DPR RI

usaha di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, yang menyebabkan adanya penyempitan sungai.

Anggota Komisi IV Khalid mengatakan, perlu kajian untuk mengembalikan kembali fungsi Sungai Batang Anai yang sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup dalam mengalirkan air dari lembah Anai maupun menampung erupsi dari Gunung Marapi tersebut. "Tadi kita berkesimpulan, kita minta KLHK beserta pemerintah daerah melakukan pengkajian secara komprehensif, mulai dari atas sampai ke hilir, dari hulu sampai ke hilir, sehingga ke depan tidak terulang lagi," kata Khalid kepada Parlementaria di Padang, Sumatera Barat, Rabu (5/6/2024) silam.

Diketahui, salah satu penyebab banjir bandang, selain hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Sumbar, juga terdapat faktor penyempitan sungai, sehingga sungai tak mampu menampung debit air yang banyak. Penyempitan tersebut karena masyarakat yang membangun tempat wisata hingga tempat usaha di sekitar Lembah Anai dan sepanjang jalan penghubung antara Padang dan Bukittinggi tersebut.

"Ini memang ada penyempitan muara. Kemudian ada erupsi yang di atas oleh Gunung Marapi. Potensi material di sana menurut informasi yang kami dapat, ada sekitar hampir satu juta, ini yang mengalir sekitar 200. Ini ada problem besar di atas. Maka, tadi kami berkesimpulan ini harus dilakukan kajian secara komprehensif, sehingga tidak terulang lagi," jelasnya.

Sementara itu, kepada masyarakat yang selama ini telah membuka tempat wisata dan tempat usaha pada area tersebut, Khalid mendorong ada realokasi ke tempat yang aman bagi mereka. Realokasi ini agar masyarakat dapat tetap berjualan dengan aman.

"Kita lakukan pengkajian, mungkin mereka yang selama ini duduk, membangun tempat jualan di badan sungai, mungkin kita geser di mana titik amannya. Maka, perlu pengkajian secara komprehensif di mana titik amannya. Kalau tidak sama saja kan mereka bangun lagi. Nanti pas hujan dibawa lagi, kan sayang juga masyarakat," harap legislator Dapil Aceh II ini.

Harus Ada Audit Konstruksi Tol Bocimi

Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) harus dilakukan audit konstruksi. Pasalnya, terjadi longsor di jembatan Cikeretek, Cianjur. Ternyata, Bina Marga sendiri masih mengajukan dua opsi perbaikan jalan tol ini. Padahal, Komisi V DPR RI berharap tol ini segera rampung.

nggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, harus ada audit konstruksi di wilayah Cianjur. Ini disampaikannya usai meninjau Tol Bocimi bersama Bina Marga. Audit konstruksi terutama di sekitar Cianjur untuk kemudian dilakukan revitalisasi. Komisi V justru datang untuk menanyakan kapan akses jalan tol ini diselesaikan. Mulyadi menyampaikan hal ini kepada Bina Marga di Tol Bocimi KM 64 pada Kamis (23/5/2024) silam.

Mulyadi menyayangkan, Bina Marga masih pada tahap melayangkan dua opsi perbaikan tersebut. itu berarti belum ada progres yang dilakukan. "Kami malah kaget, ternyata disodorkannya malah masih dua opsi penyelesaian. Saya pikir, saya hadir dengan rekanrekan itu untuk (bertanya) kapan ini diselesaikan," ujar Mulyadi.

Jalan Tol Bocimi ditargetkan selesai diperbai pada libur Natal.





 $Anggota\ Komisi\ V\ DPR\ RI\ Mulyadi\ saat\ pertemuan\ dengan\ Bina\ Marga\ di\ Toll\ Bocimi\ KM\ 64\ (23/5/2024).$

Mulyadi pun berharap, negara mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Bina Marga untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Semua kerusakan jalan tidak boleh lambat diperbaiki. Anggota Fraksi Gerindra itu menegaskan, karakter alam sangat berpengaruh pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Di sinilah pentingnya audit konstruksi.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras di Wajo, Sulawesi Selatan, mengungkap soal perusakan hutan daerah tambang yang telah menjadi penyebab banjir. Fungsi hutan tidak lagi optimal dalam mengendapkan sedimen yang terbawa dari atas gunung, sehingga meningkatkan risiko banjir.

"Karena ini salah satu penyumbang banjir terbesar,



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, saat meninjau lokasi banjir dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR ke Wajo.

daerah-daerah tambang ini yang merusak hutan, sehingga air hujan yang tadinya harus diendapkan di tanah dulu, langsung dialirkan ke sungai. Akibatnya beberapa sungai termasuk Kabupaten Luwu kemarin itu kita dapati banyak endapan. Bahkan, longsoran sedimen yang terbawa dari atas gunung ini semua diakibatkan hutan kita enggak maksimal lagi fungsinya," ujar Andi lwan.

Anggota F-Gerindra DPR ini menyampaikan isu tersebut pada kunjungan kerja spesifik Komisi V ke Wajo, Sulsel, Rabu (22/5/2024). Ia menegaskan bahwa penanganan antisipasi banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR saja, namun keterlibatan kementerian lain juga sangat diperlukan. Kolaborasi antarlembaga diharapkan

Longsoran sedimen yang terbawa dari atas gunung ini semua diakibatkan hutan kita enggak maksimal lagi fungsinya

Andi Iwan Darmawan Aras.

memberi solusi yang komprehensif dalam mengatasi banjir.

Dia mengajak masyarakat turut serta menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat membantu mengurangi risiko bencana alam, termasuk banjir.

"Kami mengajak masyarakat untuk aktif menjaga lingkungan di wilayah masing-masing, karena partisipasi mereka dalam pelestarian lingkungan dapat mengurangi risiko bencana alam, termasuk banjir," pungkasnya.

Pernyataannya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan, terutama terkait perlindungan hutan dan mitigasi risiko bencana. Diharapkan langkah-langkah konkret segera diambil untuk mengurangi dampak buruk dari perusakan hutan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi banjir di masa mendatang.

eno,blf/mh

Memitigasi Pertambangan Timah Ilegal

Sengkarut pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung kian merugikan keuangan negara sekaligus merusak ekologi secara luas. Solusi membenahi tata kelola timah secara holistik jadi keniscayaan untuk segera dirumuskan.

ertambangan ilegal di Pulau Bangka, Bangka Belitung jadi sorotan tajam Komisi VI DPR RI. Bahkan, Komisi ini secara khusus membentuk Panitia Kerja (Panja) Timah yang akan terus mengawasi kinerja PT. Timah setelah skandal mega korupsi di perusahaan plat merah tersebut terkuak. Pada Rabu, (26/6) lalu, Panja Timah secara khusus berkunjung ke Bangka Belitung untuk melihat dari dekat praktik pertambangan ilegal yang telah merugikan negara dan merusak ekologi setempat. Praktik Ilegal tersebut sudah berjalan lama, bahkan praktik ilegalnya berdampingan dengan pertambangan timah legal milik PT. Timah. Ketua Panja Timah, Komisi VI DPR RI M. Sarmuji menyampaikan, perlu dipikirkan solusi jangka panjang untuk mengurai persoalan pelik pertambangan ilegal dan korupsi yang membelit PT. Timah. Pertambangan ilegal itu berlangsung di darat dan laut. Setelah ditambang tak ada pemulihan ekologi di lokasi pertambagan ilegal tersebut. Ini akan jadi beban masalah masa depan.



Ketua Panja Timah Komisi VI DPR RI M. Sarmuji saat meninjau kawasan pertambangan timah milik PT. Timah dan pertambangan ilegal di Bangka, Bangka Belitung.

"Kita inginkan agar penambangpenambang ilegal itu sebaiknya diberikan beberapa opsi. Mereka ditindak secara tegas atau ada pikiran lain yang bisa kita diskusikan, sekalian saja mereka dilegalkan menjadi mitra yang memproduksi timah, lalu distandardisasi oleh PT. Timah untuk menjadi bagian dari pemungutan pajak. Jadi, ini opsi-opsi lagi kita pikirkan bagaimana mengatasi penambang-penambang ilegal tersebut," papar Sarmuji.

Politisi Partai Golkar ini, tak habis pikir, bagaimana praktik pertambangan timah ilegal itu berlangsung begitu lama dan berdampingan dengan pertambangan legal milik PT. Timah yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Di pantai misalnya, ada kapal-kapal besar pengangkut hasil tambang milik PT. Timah. Di dekatnya, juga banyak kapal



Wakil Ketua Panja Timah Komisi VI DPR RI Aria Bima saat diwawancarai disela-sela Kunspek di Bangka Belitung.

Proses penambangan legal yang dilakukan PT. Timah selalu ada pemulihan ekologinya pasca penambangan

Aria Bima. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

kecil milik para penambang ilegal. Ironis, seperti ada pembiaran atas praktik pertambangan ilegal tersebut.

"Ini tentu jadi keprihatinan kita semua. Penambang ilegal itu hadir di depan mata tanpa ada kekhawatiran akan ditangkap. Barangkali pernah dilakukan tindakan, hanya hari ini mereka melakukan bebas saja menambang secara ilegal. Ini pasti menimbulkan kerugian negara,

karena para penambang ilegal itu pasti tidak dibebani berbagai biaya termasuk pajak," kilah Sarmuji lagi.

Masih di tempat yang sama, Wakil Ketua Panja Timah Aria Bima juga ikut prihatin melihat kondisi terkini di kawasan pertambangan, Bangka Belitung. Ia berharap, kelak Panja Timah bisa menemukan solusi konkret atas masalah ini. "Saya kira Panja Timah harus menemukan soluai itu. Dan yang lebih penting lagi menjaga lingkungan Bangka ini tidak dieksplorasi dan dieksploitasi, tanpa menjaga keberlangsungannya," kata Aria.

Saat melihat langsung pertambangan legal dan ilegal di Pulau Bangka, Aria menyampaikan, Panja ingin memitigasi proses penambangan timah di Bangka ini. Proses penambangan legal yang dilakukan PT. Timah selalu ada pemulihan ekologinya pasca penambangan. Kolam besar bekas eksplorasi timah, misalnya, ada yang dimanfaatkan untuk penangkaran buaya atau ditanami kembali mangrove. Sementara yang ilegal kian merusak ekologi setempat.

"Kunjungan ini untuk bisa melihat secara langsung dari hulunya. Proses penambangannya seperti apa, baik yang legal maupun ilegal. Kita mau memitigasi alur proses penambangan timah itu seperti apa. Kerugian negara yang Rp300 triliun lebih itu, kan, akumulasi dari kerugian termasuk kerugian masalah lingkungannya," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Aria, tambang-tambang ilegal yang beroperasi di sekitar area pertambangan milik PT. Timah jadi beban masalah pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat lokal yang dipekerjakan di pertambangan ilegal itu tak memahami soal legal dan ilegal ini. Di sinilah butuh solusi jangka panjang yang holistik untuk menyelamatkan pendapatan negara, lingkungan, dan di sisi lain menyejahterakan masyarakat.

Perusahaan Smelter Nikel Harus Perhatikan Keselamatan Pekerja

Perusahaan smelter nikel sudah berkali-kali mengalami insiden kecelakaan kerja. Para pekerjanya selalu menajdi korban. Ledakan mesin kerap terjadi yang mengakibatkan korban jiwa pekerja. Ini menjadi perhatian serius Komisi VII DPR RI.



Anggota Komisi VII DPR Bambang Hermanto bersama tim saat mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5).

eperti dikemukakan Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto, perusaan smelter nikel seperti PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI), agar meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja untuk para pekerjanya. Di satu sisi, investor yang masuk tentu menguntungkan Indonesia. Namun, rendahnya perhatian pada keselamatan dan kesehatan pekerja jadi masalah yang sangat merugikan.

"Bagaimanapun kita sangat senang banyak investor masuk ke Indonesia untuk memperluas lapangan pekerjaan. Tetapi, kita juga ingin bahwa setiap investasi yang masuk itu memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Salah satunya adalah peraturan tentang keselamatan kerja. Tadi kita telah menuju ke smelter tempat insiden kemarin, ternyata dari komponen alat-alat keselamatan kerja tidak terpasang di sana. Yang paling gampang saja, misalnya alat pemadam api (APAR) selama perjalanan kita tidak melihat, apalagi yang lain-lain," ujar Bambang.

Dia menyampaikan hal tersebut di sela-sela mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5) silam. Untuk itu, politisi F-Golkar ini berharap, permasalahan ini bisa diselesaikan secara komprehensif. Sebaiknya dilakukan investigasi setiap kali ada inseden seperti itu. Nyawa manusia itu harus diutamakan.

"Kita bukan hanya berorientasi kepada investasi saja, tapi juga kita harus mempertimbangkan dan mengutamakan keselamatan kerja. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada pihak terkait utamanya Kementeria Perindustrian untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap keselamatan kerja bagi para pegawai di sini,"ucap Bambang. Selain itu, legislator Dapil Jabar VIII ini menilai, dengan hadirnya PT. KFI di sini sudah secara otomatis membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.

"Kalau misalnya di sini ada masyarakat yang masih belum memenuhi kompetensi tertentu, ini menjadi kewajiban kita bersama terutama bagi mereka yang sudah punya keahlian di sini bisa memberikan transfer of knowledge kepada masyarakat setempat. Sehingga, masyarakat setempat ini bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menjadi pelaku. Tentu harapan besar kita ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya masyarakat menjadi sejahtera,"imbuh Bambang.

Sementara Anggota Komisi VII lainnya, Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya menyerukan ada audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT KFI. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT. KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

"Kami akan panggil PT. KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan



Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara.

dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat Panja nikel atau kita panggil secara khusus di rapat dengar pendapat. Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan," ujarnya.

Menurut politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil temuan di lapangan seperti sarana keselamatan kerja dan sebagainya masih sangat kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Perindustrian untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

"Saya berpesan agar tidak terulang kebakaran atau ledakan, yang paling penting mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting, karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, insyaallah dengan perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini insyaallah tidak akan terjadi kembali," jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas, sehingga dianggap tidak layak untuk perusahaan smelter. Perbaikan jadi keniscayaan untuk segera dilakukan.

"Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba, tetapi sudah menimbulkan ledakan. Padahal, masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut," ungkapnya lagi.

Timwas Haji Inspeksi Fasilitas Haji

Tim Pengawas Haji, Komisi VIII DPR RI gencar melakukan inspeksi ke berbagai fasilitas jemaah haji Indonesia di Mekkah dan Madinah, Arab Saudi. Ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat melakukan inspeksi ke salah satu hotel transit jemaah haji Indonesia di Madinah.

alah satu hotel yang diinspeksi adalah Hotel Taiba Suite yang berlokasi di Masjid Nabawi. Hotel ini dinilai sangat baik dari sisi pelayanan dan fasilitas. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

yang juga anggota Timwas Abdul Wachid mengatakan, fasilitas hotel itu melebihi ekspektasi. "Hotel ini memiliki fasilitas yang 'wah'. Saya minta ketua regu untuk memanfaatkan fasilitas ini untuk



sosialisasi penggunaan fasilitas hotel transit bisa dilakukan secara efektif kepada ketua regu jemaah, sehingga jemaah dapat beristirahat dengan baik tanpa khawatir ketinggalan penerbangan

Abdul Wachid. Wakil Ketua VIII DPR RI



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily saat melakukan pengawasan haji 2024 di Arab Saudi.

beristirahat sambil menunggu penerbangan." Ujar Abdul Wachid.

Meskipun memuji fasilitas hotel, Wachid mengingatkan pentingnya ketepatan waktu keberangkatan ke bandara. "Ini bagus, tapi perlu diwaspadai ketepatan waktu untuk berangkat ke airport. Perjalanan dari hotel ini ke Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz sekitar 40 menit," jelasnya di Madinah, Senin (24/6/2024).

Wachid berharap agar sosialisasi penggunaan fasilitas hotel transit bisa dilakukan secara efektif kepada ketua regu jemaah, sehingga jemaah dapat beristirahat dengan baik tanpa khawatir ketinggalan penerbangan. "Saya minta ketua regu dikumpulkan dan disosialisasikan, agar para jemaah itu tidak keluar, istirahat, tidak malah ke masjid," pungkasnya.

Dengan adanya fasilitas hotel transit yang memadai ini, diharapkan jemaah haji Indonesia Menurut laporan
Direktur Pelayanan
Dalam Negeri, ada
keterlambatan
dalam mengurus
kepulangan
jemaah haji yang
seharusnya dari
Jeddah akhirnya
dari Madinah

dapat menikmati masa transit mereka dengan nyaman dan aman, serta dapat kembali ke Tanah Air dengan kondisi yang prima. Sementara Wakil Ketua Komisi VIII lainnya, Ace Hasan Syadzily menyerukan Kementerian Agama memastikan kepulangan para jemaah tidak terlambat. Katanya, penting pelayanan yang maksimal bagi para jemaah yang akan kembali ke Tanah Air. "Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada mereka selama di Madinah betul-betul dilayani sebaik-baiknya," imbuh Kang Ace, sapaannya.

Kang Ace menyoroti potensi penurunan kualitas pelayanan setelah puncak ibadah haji selesai. Ia menegaskan bahwa Timwas Haji DPR meminta Kemenag tetap memberikan pelayanan prima kepada jemaah haji yang tiba di Madinah pasca-puncak haji.

Selain itu, Kang Ace juga menyoroti perubahan rute kepulangan jemaah haji Indonesia tahun ini. Berbeda dengan tahuntahun sebelumnya, sebagian jemaah haji tahun ini pulang ke Tanah Air tidak melalui Jeddah, melainkan melalui Madinah. "Menurut laporan Direktur Pelayanan Dalam Negeri, ada keterlambatan dalam mengurus kepulangan jemaah haji yang seharusnya dari Jeddah akhirnya dari Madinah," jelas politisi Partai Golkar ini.

Timwas DPR menyayangkan sebagian jemaah haji yang harus transit terlebih dahulu di Madinah setelah dari Makkah sebelum kembali ke Indonesia. Kang Ace menilai hal ini kurang efisien. "Kalau dilihat, menjadi sangat tidak efisien. Setelah datang ke Madinah lalu melaksanakan haji di Makkah, habis itu ke Madinah lagi, baru kembali ke Tanah Air," pungkasnya.

Permintaan dari Timwas DPR ini diharapkan direspons oleh Kemenag agar kepulangan jemaah haji Indonesia berjalan lancar dan tanpa hambatan, serta memastikan pelayanan optimal hingga jemaah tiba di Tanah Air.

Mengawasi Kesehatan Jemaah Lansia

Pada kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang bertepatan dengan musim haji, perhatian terhadap aspek kesehatan calon jemaah haji lansia jadi krusial. Di embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, calon jemaah haji lansianya mencapai 80,1 persen.

esehatan jemaah lansia sebelum bertolak ke Tanah Suci jadi fokus perhatian delegasi Komisi IX DPR di Sumsel pada Senin (3/6). Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay yang memimpin kunjungan menyoroti tingginya jumlah calon jemaah lansia di embarkasi tersebut. Karena mayoritas jemaahnya lansia, jaminan kesehatan calon jemaah menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.

"Ini sebetulnya embarkasi yang saya kira perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Karena embarkasi ini adalah salah satu embarkasi di Indonesia yang tingkat lansianya tinggi. Berdasarkan laporan jumlah lansia mecapai 80 persen dari total jemaah yang akan berangkat," ungkap Saleh.

Komisi IX DPR melakukan peninjauan fasilitas hingga ruang Poliklinik di embarkasi tersebut. Meskipun ada kekurangan dalam fasilitas dan anggaran, namun pemeriksaan kesehatan para calon jemaah di Sumatera Selatan sudah berjalan dengan baik.

Komisi IX bahkan mengapresiasi pemerintah, karena menerapkan 'triple check' dalam tahapan

Saya kira perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Karena embarkasi ini adalah salah satu embarkasi di Indonesia yang tingkat lansianya tinggi. Berdasarkan laporan jumlah lansia

mecapai 80 persen dari total jemaah

yang akan berangkat

Saleh Partaonan Daulay. Anggota Komisi IX DPR RI

pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji sebelum diberangkatkan. Sebelum diperiksa final di embarkasi, para calon jemaah haji terlebih dulu medical check up dari Puskesmas dan rumah sakit.

"Bahkan kalau ada yang sakit bawa ke rumah sakit, dan kalau memang tidak sanggup tidak diberangkatkan. Saya melihat sejauh



Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay beserta tim mengecek aspek kesehatan calon jemaah haji di Embarkasi Palembang, Asrama Haji Provinsi Sumatera Selatan, Senin (3/6/2024).



Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/6/2024).

ini kalau di Sumatera Selatan sudah sangat baik, meskipun tentu ada kekurangan-kekurangan. Misalnya, fasilitas ditambah, petugas ditambah, anggarannya ditambah," pungkas legislator Dapil Sumut II itu.

Selain ke Sumatera Selatan, delegasi Komisi IX juga melakukan kunjungan spesifik ke Embarkasi Haji Makassar. Komisi IX mengapresiasi Layanan One Stop Service (OSS) di Embarkasi Haji Makassar. Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari, memberikan apresiasi terhadap inovasi layanan One Stop Service (OSS) yang diterapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di embarkasi tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi dengan inovasi yang dijalankan oleh teman-teman yang ada di embarkasi Makassar. Ini justru mempercepat durasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang ada di sini," terangnya. Layanan OSS yang diperkenalkan pada tahun 2024 mencakup pemeriksaan kesehatan bagi jemaah dan Wanita Usia Subur (WUS) yang dilakukan di satu

66

Pentingnya durasi yang singkat dalam pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji. Ini dapat menghemat waktu, sehingga memberikan kesempatan lebih panjang bagi mereka untuk beristirahat dan mempersiapkan diri.

Putih Sari. Anggota Komisi IX DPR RI

tempat dan layanan jemput bola bagi jemaah lansia.

Selain itu, tersedia juga layanan pembagian lembar akomodasi dan penyerahan living cost bagi jemaah, sehingga proses tersebut menjadi lebih efisien. Legislator Fraksi Partai Gerindra ini, menekankan pentingnya durasi yang singkat dalam pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji. Ini dapat menghemat waktu, sehingga memberikan kesempatan lebih panjang bagi mereka untuk beristirahat dan mempersiapkan diri.

Embarkasi Haji Makassar, selain memberangkatkan jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Selatan, juga menjadi tempat pemberangkatan bagi jemaah haji dari beberapa provinsi lainnya seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pada tahun 2024, Embarkasi Haji Makassar akan memberangkatkan sebanyak 16.669 jemaah haji dari 8 provinsi, terbagi dalam 37 kloter penerbangan. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan kehadiran 121 Petugas Haji Daerah (PHD) dan 205 petugas PPIH kloter. — pun,rr,aha/mh

Mengapresiasi Desa Wisata di Kepri

esa Ekowisata Pandang Tak Jemu, begitulah tajuk destinasi wisata itu diberi nama. Lokasinya dikelilingi desa-desa. Tentu sangat menarik. Selain bisa menghidupkan ekonomi warga setempat, ekowisata ini juga sekaligus mampu menjaga kelestarian habitat mangrove di pesisir.

"Tempat ini menarik, karena dikelilingi desa-desa. Dan ciri khas pesisirnya dengan menonjolkan batik khas, dan hasil UMKM-nya.. Mudahmudahan secara legalitas lahan dari Ekowisata Pandang Tak Jemu bisa diakui oleh pemerintah daerah sebagai desa wisata dan lahannya ini ditetapkan untuk ekowisata. Tidak digunakan untuk non wisata," pandang Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf.

la memimpin langsung kunjungan kerja ke Kepri untuk melihat dari dekat potensi Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/6/2024) lalu. Desa Ekowisata Pandang Tak Jemu telah meraih peringkat 50 besar dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022, dengan jumlah pengunjung rata-rata 500-600 orang setiap akhir pekan.

Dalam kunjungan ini, Dede juga mengapresiasi Wali Kota Batam Muhammad Rudi atas upayanya membangun sektor pariwisata di Kota Batam. Dia mencatat bahwa Batam menjadi contoh bagi daerah lain dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Masih banyak daerah lain yang hanya berharap dari pemerintah pusat saja dalam pengembangan pariwisata di daerahnya, tanpa ada Komisi X DPR RI sangat mengapresiasi terbentuknya destinasi wisata baru di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Desa wisata itu menggabungkan kawasan mangrove dengan pantai. Terciptalah keindahan yang menawan bagi mata yang memandangnya.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf M. Efendi saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI mengunjungi Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, Batam.

Desa Ekowisata
Pandang Tak
Jemu telah meraih
peringkat 50 besar
dalam Anugerah
Desa Wisata
Indonesia

Dede Yusuf M. Effendi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI kerja nyata dari pemerintah daerah. Untuk itu, pembangunan akan kita masukan ke dalam RUU tentang Kepariwisataan yang insyaallah akan kita sahkan sebentar lagi," jelas politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Pengawasan terhadap pariwisata tidak hanya dilakukan di Batam, Komisi X juga membagi timnya ke Sulawesi Selatan untuk menyerap masukan dari masyarakat terkait RUU Kepariwisataan. Anggota Komisi X laiinya, Mitra Fakhruddin mengatakan, Kawasan Timur Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa.

"Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan destinasi-destinasi pariwisata di wilayah tersebut. Kami hadir disini untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pariwisata," jelasnya, saat mengikuti kunjungan Panja RUU Kepariwisataan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (21/06/2024) lalu.

Untuk mengembangan pariwisata ia mendorong pemerintah daerah menciptakan SDM unggul di bidang pariwisata. Karenanya, ia berharap agar Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan berkolaborasi membuat lembaga pendidikan yang menghasilkan SDM berkualitas di sektor pariwisata. "Harapan saya, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan hadir membuat lembaga pendidikan yang menghasilkan SDM berkualitas, baik dalam pelayanan, keterampilan, dan penguasaan bahasa," pungkasnya.

Sementara di bidang pendidikan, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, mengunjungi Kantor Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kunjungan tersebut, dia menegaskan komitmen pemerintah



Anggota Komisi X DPR RI, Mitra Fakhruddin saat mengikuti Kunjungan Kerja Panja RUU Kepariwisataan di Makassar.

mengalokasikan anggaran sebesar Rp365 triliun per tahun ke daerah, khususnya untuk pengembangan pendidikan. Purnamasidi menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap alokasi dana tersebut agar benarbenar tepat sasaran.

"Jadi, sebenarnya kita ingin mengecek itu, apakah itu betulbetul teralokasi atau tidak. Kalau teralokasi apakah betul-betul untuk kepentingan pendidikan secara langsung, atau hanya bersifat sekunder. Nah, itu sebenarnya yang mau kita harapkan dari ini," kata Purnamasidi usai memimpin kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Kantor Wali Kota Pontianak di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (24/6/2024) lalu.

Selain itu, dia juga mengapresiasi Pontianak yang berhasil menggunakan anggaran dengan efektif untuk membayar tenaga pendidik, termasuk guru-guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terserap 100%. Namun, Purnamasidi juga menyoroti masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan penerapan sistem zonasi yang belum merata, karena perbedaan infrastruktur pendidikan di setiap zona.

Politisi dari Fraksi P-Golkar ini juga menyampaikan kebutuhan untuk pemerataan jumlah sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di setiap zona guna menghindari ketimpangan dalam zonasi pendidikan yang dapat mengganggu keadilan akses pendidikan. *** ssb.upi,aas/mh



Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi dalam foto bersama saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Wali Kota Pontianak.

Mengedukasi Masyarakat dari Bahaya Pinjol

Komisi XI DPR RI kembali mengingatkan tentang bahaya pinjaman online (Pinjol). Mengatasinya tidak cukup dengan menguatkan peraturan. OJK juga harus aktif menyosialisasikan dan mendidik masyarakat tentang dampak dan risiko menggunakan Pinjol ini.



Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng saat bertukar mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Semarang.

ada pertemuan Komisi
XI DPR dengan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) di
Semarang, Jawa Tengah,
diserukan agar ada
edukasi kembali kepada masyarakat
tentang bahaya Pinjol, terutama
yang ilegal. Anggota Komisi XI
DPR RI Melchias Markus Mekeng
mengatakan, sosialisasi dan edukasi
harus dilakukan secara luas melalui
berbagai media agar masyarakat
benar-benar mengerti bahwa
pinjaman online, meskipun cepat dan
praktis, juga memiliki risiko.

"Menurut hemat saya yang harus diperkuat dari OJK adalah sosialisasi. Sosialisasi itu harus lebih banyak masuk ke media-media, media cetak, media TV, media online, semua dan secara masif. Jadi, masyarakat itu aware bahwa memang ini salah satu produk dunia keuangan yang cepat dan praktis, tapi di lain pihak masyarakat juga harus tahu dampak dan risiko dari Pinjol itu," ujarnya, Senin (29/04/2024).

Mekeng menjelaskan bahwa orang-orang yang sering terjebak Pinjol, umumnya dalam keadaan mendesak butuh uang. Dan Pinjol menawarkan solusi yang cepat. Namun, di balik kemudahan itu, ada risiko tertentu seperti Orang-orang yang sering terjebak Pinjol, umumnya dalam keadaan mendesak butuh uang. Dan Pinjol menawarkan solusi yang cepat. Namun, di balik kemudahan itu, ada risiko tertentu seperti proses penagihan yang keras dan peningkatan jumlah pinjaman.

Melchias Markus Mekeng.

proses penagihan yang keras dan peningkatan jumlah pinjaman.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakat agar mereka memahami, baik manfaat maupun risiko dari menggunakan Pinjol ini. Dengan kata lain, Mekeng menekankan bahwa selain mengatur dengan ketat, pendekatan edukasi kepada masyarakat sangat penting agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman online.



 $Anggota\ Komisi\ XI\ DPR\ RI,\ Puteri\ Komarudin\ dalam\ foto\ bersama\ usai\ mengikuti\ Kunjungan\ Kerja\ Komisi\ XI\ bersama\ LPS\ ke\ Bank\ Sentral\ Spanyol.$

Kerja Sama Bank Sentral

Sementara itu, di bank sentral Spanyol, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoal kerja sama antarbank sentral dalam mengeksplorasi mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).

"Saat ini bank sentral di banyak negara tengah mendalami mata uang digital. Survei yang dilakukan Bank of International Settlements (BIS) tahun 2021 menyebutkan 86 persen bank sentral yang disurvei tengah melakukan penelitian terkait CBDC. 60 persen sedang melakukan percobaan teknologi, dan 10 persen di tahap pilot project. Artinya, kita memiliki fokus yang sama untuk mendalami potensi pengembangan CBDC di negaranya masing-masing, termasuk Indonesia dan Spanyol," ungkap Puteri.

Puteri berkunjung ke bank sentral Spanyol bersama anggota DPR RI lainnya dan LPS, Selasa (7/5/2024) silam. Bank sentral Spanyol sedang melakukan uji coba pengembangan mata uang euro digital. Sejak awal tahun ini, bank sentral Spanyol diketahui tengah melakukan simulasi dengan melibatkan Cecabank, Abanca, dan Adhara Blockchain untuk menggali manfaat dan kelayakan euro digital di sektor perbankan.

"Setelah berjalan selama 4 bulan, apa saja hasil evaluasi dan tantangan bank sentral Spanyol terkait percobaan tersebut. Lalu, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk menerapkan CBDC sepenuhnya di Spanyol. Karena pada November lalu, Gubernur bank Sentral Spanyol menyebut euro digital belum mendesak, tetapi proyek ini tetap perlu dilanjutkan," pandang politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Puteri juga menyampaikan perkembangan terkini terkait pengembangan rupiah digital di Indonesia. Awal Maret lalu, Bank Indonesia juga masih dalam tahap memilih teknologi yang akan digunakan untuk implementasi rupiah digital dan memfinalisasi proof of concept tahap pertama. Selain itu, BI juga masih melakukan piloting dan simulasi terhadap penerapan rupiah digital secara internal.

Di sinilah, penting menjalin kerja sama antarbank sentral dalam mengkaji kelayakan penerapan mata uang digital. Puteri berpesan, bank sentral bisa menganalisis secara komprehensif rencana pengembangan mata uang digital.

"Untuk itu, kami harapkan terjalin pertukaran informasi terkait hasil pengujian, modeling, maupun simulasi. Sehingga, kita bisa saling mengetahui potensi dampak maupun risiko yang ditimbulkan dari penerbitan CBDC ini terhadap stabilitas keuangan, moneter, dan perekonomian kita," tutup Puteri.

gal/mh

Kebijakan *Ngawur,* Membagi IUPK untuk Ormas

Polemik pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) masih terus jadi perbincangan publik. Bahkan, pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya memberikan izin penambangan kepada ormas keagamaan.

UU Minerba (mineral dan batu bara).

"Coba itu Pak Bahlil (Menteri Investasi) bagi-bagi IUPK untuk ormas. Padahal, kalau kita baca seksama UU Minerba, izin pertambangan itu diajukan badan usaha paling tidak koperasi. Pemerintah akal-akalan mengatur norma bahwa badan usaha sahamnya bisa dimilik ormas secara mayoritas. Itu, kan, norma baru yang tidak ada dalam UU," ujar Mulyanto dalam

PR RI menyoroti soal ini secara serius. Dua komisi yang bersinggungan dengan persoalan ini adalah Komisi VII DPR bidang energi dan Komisi VI DPR bidang BUMN yang mempertanyakan kebijakan ini. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto yang mengeritik keras kebijakan pemerintah tersebut. Ia menyebut ini sebagai tanda bahwa pemerintah tidak taat aturan atau sembarangan dalam mengurus sektor ESDM (energi dan sumber daya mineral).



Mulyanto. Anggota Komisi VII DPR RI



Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Kepada Parlementaria, Mulyanto mengungkapkan bahwa semakin hari pemerintah semakin ngawur dalam mengelola ESDM. Seenaknya saja melanggar peraturan dengan cara membuat penafsiran sendiri tentang rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, awal Juni lalu.

Pemerintah, lanjut Mulyanto, seharusnya mengacu pada ketentuan UU No.3/2020 tentang



Karena konsesi tambang bukan sebatas izin di lembaran kertas. Ada proses yang panjang. Ada tuntutan profesional, tuntutan modal, lingkungan, dan sebagainya. Kalau Ormas, selama ini kan tidak pernah ngurusi tambang

Subardi. Anggota Komisi VI DPR RI

Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dimana penawaran IUPK terhadap wilayah pertambangan yang telah dikembalikan kepada negara diprioritaskan untuk BUMN/BUMD (bukan untuk badan usaha swasta, apalagi ormas).

"Yang luar biasa lagi, Ormas akan diprioritaskan untuk mendapatkan IUPK. Padahal, kalau kita baca UU, yang namanya prioritas tegas-tegas itu diberikan kepada BUMN/BUMD. Selain lembaga-lembaga tersebut IUPK diberikan melalui proses lelang," tambahnya.

Tidak hanya Mulyanto, anggota Komisi VI DPR Subardi juga mengatakan hal senada. Ia menilai pemberian izin ini tidak memiliki urgensi dan bersifat diskriminatif. Pasalnya, tidak sedikit Ormas di bidang keagamaan yang tidak memiliki lembaga ekonomi. Dalam UU No.17/2013 dikatakan bahwa Ormas merupakan organisasi nirlaba yang mandiri dan bersifat sosial.

"Apa urgensinya? Ormas diatur dalam UU Ormas dan itu bukan lembaga bisnis. Ormas apapun itu tidak berbisnis. Ketika Pak Menteri memberikan prioritas kepada Ormas keagamaan, berarti ada diskriminasi," ujar Subardi dalam rapat Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM di DPR, pertengahan Juni silam.

Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini mengakui bahwa kontribusi Ormas keagamaan untuk bangsa sangatlah besar. Tetapi pemberian izin tambang bukan soal kontribusi Ormas kepada bangsa. Melainkan tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan

Penawaran IUPK
terhadap wilayah
pertambangan yang
telah dikembalikan
kepada negara
diprioritaskan untuk
BUMN/BUMD (bukan
untuk badan usaha
swasta, apalagi
ormas)

Mulyanto. Anggota Komisi VII DPR RI tambang, termasuk pengalaman Ormas di sektor tambang.

"Karena konsesi tambang bukan sebatas izin di lembaran kertas.
Ada proses yang panjang. Ada tuntutan profesional, tuntutan modal, lingkungan, dan sebagainya. Kalau Ormas, selama ini kan tidak pernah ngurusi tambang," pungkasnya.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, kebijakan pemerintah tersebut lebih mencerminkan kepentingan politik ketimbang kepentingan ekonomi, bahkan cenderung blunder. Pasalnya, Ormas keagamaan tidak punya kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi pertambangan.

Bahkan, ia memperkirakan kebijakan tersebut akan membuat Ormas keagamaan hanya berperan sebagai broker atau makelar dengan mengalihkan wilayah IUPK kepada perusahan tambah swasta yang tidak mengantongi IUPK. Oleh karena itu, ia minta pemerintah membatalkannya, sembari merevisi PP No.25/2024, karena lebih besar mudharatnya ketimbang manfaatnya," tegasnya.

ayu/mh

DPR-Republik Rakyat Tiongkok Jajaki Kerja Sama Diplomatik Baru

Tahun depan, Indonesia dan RRT akan menyambut babak hubungan diplomatik yang baru. 75 tahun, bukan sembarang angka. Angka ini menunjukkan hubungan diplomatik yang telah terjalin lawas sekaligus kuat antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).



erayakan hubungan diplomatik tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar serangkaian kunjungan kerja ke RRT. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik dengan RRT pada 13 April 1950. Seiring berjalannya waktu, hubungan diplomatik Indonesia dan RRT menciptakan berbagai kerja sama di berbagai sektor, termasuk kerja sama antarparlemen.

Puan menekankan bahwa RRT adalah mitra strategis yang berkontribusi terwujudnya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ASEAN, Indo-Pasifik, dan tingkat global. Ia berharap kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dapat difokuskan untuk mengimplementasikan Plan of Action for Strengthening the Comprehensive Strategic Partnership 2022-2026 yang telah ditetapkan bersama.

Sepanjang 28 Mei-2 Juni 2024, dirinya didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Wakil Ketua BURT DPR RI Dede Indra Permana, Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi, Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti, dan Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu berkunjung ke RRT untuk membuka babak baru hubungan diplomatik antara Indonesia-RRT.

Membuka rangkaian agenda kunjungan kerja ke RRT, Puan melakukan pertemuan bilateral secara beruntun dengan Ketua National People's Congress/NPC (Kongres Rakyat Nasional) RRT Zhao Leji dan Ketua Chinese People's Political Consultative Conference/

Saya pun mendukung Rencana Aksi untuk meningkatkan kerja sama empat pilar yang meliputi politik, ekonomi, pertukaran antarmasyarakat, dan proyek maritim

Puan Maharani

CPPCC (Badan Penasihat Politik Tiongkok atau Cina) Wang Huning.

Pertemuan bilateral itu berlangsung dengan hangat di Ruang Anhui, Gedung Great Hall of The People. CPPCC yang kerap disebut sebagai Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) Tiongkok



Ketua DPR RI Puan Maharani saat melakukan pertemuan dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional RRT, Zhao Leji di kompleks Gedung Great Hall of The People (Balai Agung Rakyat) Tiongkok.

merupakan bagian sentral dari sistem terdepan persatuan Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Perlu diketahui, Anggota MPP bisa memberikan nasihat serta mengajukan proposal mengenai isu politik dan sosial kepada badanbadan pemerintah Tiongkok. Sebab itu, Puan menuturkan berbagai peluang kerja sama yang bisa dijajaki bersama.

Secara khusus, ia berharap hubungan Indonesia dan RRT bisa berkontribusi untuk pemulihan ekonomi dan implementasi kerja sama bilateral konkret RI-RRT. Salah satunya seperti yang tercantum dalam Rencana Aksi Kemitraan Strategis RI-RRT 2022-2026.

"Meski terdapat perubahan pemerintahan di Indonesia, saya ingin menegaskan bahwa hubungan RI-RRT tidak akan terpengaruh. Saya pun mendukung Rencana Aksi untuk meningkatkan kerja sama empat pilar yang meliputi politik, ekonomi, pertukaran antarmasyarakat, dan proyek maritim," tutur perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu.

Sebagai informasi, sejak tahun 2021, perdagangan Indonesia dan Tiongkok mencatat kenaikan signifikan pertama kali melebihi US\$ 100 miliar. Pada tahun 2023 perdagangan kedua negara tercatat sebesar US\$ 127 miliar. Meski demikian, potensi perdagangan masih dapat terus dikembangkan.

Adanya penjajakan peluag kerja sama ini, dirinya berharap investasi Tiongkok di Indonesia tetap memperhatikan aspek berkelanjutan (sustainability) dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam konteks peningkatan standar Environmental, Social, and Governance (ESG). Ia juga menggarisbawahi tentang Regional Comprehensive Economic Corridor,

yang merupakan bagian penting Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara.

"Dukungan RRT sangat krusial bagi percepatan implementasi, proyek strategis di Kawasan Industri Kalimantan Utara, khususnya investasi di bidang Petrokimia. Saya juga mendukung peningkatan kerja sama pembangunan untuk infrastruktur, hilirisasi industri, manufaktur, transisi energi, ketahanan pangan dan investasi," jelasnya.

Puan pun menyatakan menyambut baik berbagai isu kunci yang mendukung peningkatan hubungan dagang antara Indonesia dan Tiongkok, di antaranya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi digital seperti melalui kerja sama di bidang e-commerce, pembayaran dengan QRIS, dan mendorong transformasi digital di Indonesia.









Matindas J. Rumambi

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Minggu (26/5/2024) lalu, mengguyur Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Akibat curah hujan tinggi tersebut, Sungai Purwokerto meluap dan menggenangi rumah warga serta ratusan hektar lahan persawahan yang terancam gagal panen.



Anggota DPR RI Matindas J. Rumambi saat memberikan bantuan untuk korban banjir di Desa Balinggi Jati.

engetahui bencana banjir yang menyebabkan sekitar 80 unit rumah terendam tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi mengunjungi korban banjir di Desa Balinggi Jati tersebut. Dalam kunjungannya, Matindas menyalurkan bantuan berupa sembako dan perlengkapan tidur bagi warga terdampak.

Bertemu dengan warga Desa Balinggi Jati, Matindas berharap, dibangun infrastruktur yang memadai seperti waduk maupun kanal drainase yang baik untuk mencegah bencana banjir kembali terulang. Sebab, wilayah tersebut merupakan wilayah langganan banjir.

"Untuk itu, masyarakat di wilayah langganan banjir sangat berharap pemerintah tidak hanya membantu memulihkan situasi, tetapi juga membangun infrastruktur sebagai solusi untuk mencegah banjir," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan ini dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria.

masyarakat di wilayah langganan banjir sangat berharap pemerintah tidak hanya membantu memulihkan situasi, tetapi juga membangun infrastruktur sebagai solusi untuk mencegah banjir

Ke depan, legislator Dapil Sulawesi Tengah ini berharap pemerintah dapat mewujudkan harapan masyarakat berupa kanal, waduk, maupun drainase yang memadai, sehingga bencana banjir tidak terus berulang setiap tahun.

bia/mh





Idah Syahidah

Dorong Perempuan Gorontalo Terjun Berpolitik



 $Anggota\ DPR\ RI\ Idah\ Syahidah\ Rusli\ Habibie,\ saat\ menghadiri\ diskusi\ Pencapaian\ Pengarusutamaan\ Gender\ (PUG)\ Bidang\ Politik\ dan\ Hukum\ di\ Provinsi\ Gorontalo.$

Hadir dalam acara Diskusi Pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Politik dan Hukum di Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie terus mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik dan hukum untuk semakin banyak dan memberikan warna yang berarti.

alam sambutannya Idah Syahidah RH mengatakan bahwa pengaruh perempuan dalam bidang politik sangat diperlukan untuk memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. "Bicara terkait politik, tidak hanya parlemen dari tingkat kabupaten hingga pusat. Tapi juga termasuk di tingkat eksekutif dari tingkat desa hingga provinsi. Perlu ada upaya-upaya untuk

menggerakkan kesadaran perempuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik," kata Idah di Gorontalo.

Dalam acara yang digelar di Grand Q Hotel Kota Gorontalo pertengahan Juni lalu itu, legislator dapil Gorontalo ini juga mendorong Kemen PPPA terus berkomitmen mengupayakan yang terbaiknya bagi perempuan dan anak Indonesia. Ini untuk memastikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak dapat terwujud.

Hadir pada acara tersebut Asdep PUG Bidang Politik dan Hukum Kementerian PPPA, Ilham Firman, dan Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman sebagai pembicara. Adapun peserta diskusi berasal dari akademisi, PKK serta organisasi pergerakan dan pemberdayaan perempuan di Gorontalo.



Hendrik Lewerissa

Serahkan Mobil Ambulans untuk Masyarakat Maluku Tengah

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa memenuhi janjinya mewujudkan aspirasi masyarakat yang notabene merupakan konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) Maluku.

spirasi tersebut berupa mobil ambulans yang bisa membantu pasien dan masyarakat yang membutuhkan perawatan medis, sementara tempat tinggalnya jauh dari rumah sakit.

"Ini aspirasi masyarakat Maluku yang disampaikan kepada saya sebelumnya. Dan sebagai bentuk komitmen kami untuk membantu masyarakat sekitar terutama dalam pelayanan kesehatan, maka sekarang kami wujudkan aspirasi masyarakat tersebut. Bersama BRI kami serahkan satu unit mobil ambulans kepada Yayasan Penggerak Maluku Manise untuk masyarakat sekitar," jelas Hendrik beberapa waktu lalu.

Dengan kata lain, penyerahan mobil ambulans ini bukan sekadar aksi sosial, tetapi juga merupakan realisasi janji atau komitmen yang pernah disampaikan Hendrik kepada masyarakat Negeri Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah saat kampanye pemilu beberapa waktu lalu.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa bantuan mobil ambulans merupakan salah satu dari banyak aspirasi yang diwujudkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2024.

Menurutnya, daerah yang jauh dari rumah sakit seperti Negeri Seith membutuhkan ambulans agar evakuasi pasien bisa lebih cepat. Oleh karenanya diharapkan mobil ambulans tersebut dapat memenuhi kebutuhan transportasi bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis dari Negeri Seith dan sekitarnya.



 $Anggota\ Komisi\ VI\ DPR\ RI\ Hendrik\ Lewerissa\ saat\ memberikan\ bantuan\ untuk\ masyarakat\ di\ daerah\ Dapilnyan bantuan\ daerah\ d$



Irma Suryani Gelar Sosialisasi JKN-KIS



Anggota DPR RI Irma Suryani saat menggelar sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Sumatera Selatan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak atas kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Tanpa kesehatan, taraf kehidupan manusia tidak berkualitas.

nggota Fraksi
Nasional Demokrat
(F-NasDem) DPR RI Irma
Suryani memastikan
konstituennya
memperoleh hak kesehatan
yang dijanjikan oleh negara. BPJS
Kesehatan merupakan institusi yang
diberikan amanah oleh Pemerintah
Indonesia untuk memberikan jaminan
kesehatan kepada seluruh rakyat
Indonesia. Satu di antaranya adalah
Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Irma menggelar kegiatan bertajuk 'Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, Dengan Gotong Royong Semua Tertolong' di Kelurahan Tanjung Agung, Baturaja Barat, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Sosialisasi ini diselenggarakan dengan menggaet BPJS Kesehatan Kabupaten Oku, BPOM Provinsi Sumatera Selatan, dan DPC Partai NasDem.

Berbondong-bondong masyarakat setempat berdatangan untuk hadir. Ada ratusan perwakilan masyarakat yang hadir, di antaranya dari kecamatan Baturaja Barat, kecamatan, Lubuk Batang, dan kecamatan Lubuk Raja.



Anisah Syakur

Salurkan Bantuan Seragam

Belasan Guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Muslimat Nadatul Ulama (IGTKM NU) di kecamatan Kabupaten Pasuruan, menerima bantuan seragam.



Anisah Syakur saat memberikan bantuan

rogram pemberian seragam tersebut merupakan program janji politik Anggota DPR RI Anisah Syakur. Bantuan ini dharapkan dapat semakin memperkuat kegiatan pendidikan 535 anggota IGTKM NU di enam kecamatan (Prigen, Pandaan, Gempol, Beji, Bangil, Rembang) yang dihadiri perwakilan 250 orang.

Bantuan hibah seragam digulirkan secara bertahap oleh Anisah.
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan hasil serap aspirasi masyarakat dengan menggunakan dana Pribadi. Saat reses, para tenaga Guru IGTKM mengusulkan agar bisa mendapatkan bantuan atau memiliki seragam untuk menunjang kegiatan rutin mereka," kata politisi PKB tersebut, beberapa waktu lalu.

Anisah mengungkapkan, total ada 535 buah seragam yang dibagikan. Ia bersyukur bisa merealisasikan bantuan itu tahun 2024 ini. Setelan seragam ini juga diharapkan memacu semangat kelompok para tenaga pengajar, supaya meningkatkan kegiatan pendidikan keagamaan dan umum untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan, Jatim.

"Setiap majelis taklim memiliki jadwal masing-masing untuk menggelar pengajian, semoga dengan bantuan ini para anggota bisa tetap rutin menggelar kegiatan lebih intens lagi," tutupnya. *** tn/mh



 $Anggota\ DPR\ RI\ Anisah\ Syakur\ saat\ memberikan\ bantuan\ unit\ motor\ kepada\ Pengurus\ Cabang\ (PC)\ Muslimat\ NU\ Kabupaten\ Probolinggo.$



Edhie Baskoro Yudhoyono

Dorong Pengrajin Tetap Eksis

Kerajinan gerabah, warisan khas Indonesia sejak zaman prasejarah, masih terus dijaga keberadaannya oleh masyarakat Desa Kartoharjo, Ngawi, Jawa Timur. Dikenal sebagai salah satu UMKM yang bertahan lama, Pokmas (kelompok masyarakat) Elang telah memproduksi 20 gerabah setiap harinya selama lebih dari enam dekade.



Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono saat bertemu dengan pengrajin gerabah di Desa Kartoharjo, Ngawi.

eskipun bertahan dalam tradisi yang kaya, pengrajin gerabah menghadapi tantangan baru dengan merosotnya minat pasar akibat dominasi perkakas plastik yang lebih ekonomis. Selain itu, proses

produksi juga masih menggunakan cara manual dan bahan pokok tanah liat masih terkendala. Mendengar keluhan itu, Anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur VII, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengunjungi langsung lokasi produksi gerabah untuk memberikan dukungan langsung.

"Saya percaya bahwa potensi pasar untuk gerabah masih ada. Kita harus terus mempromosikan kerajinan ini dengan lebih baik. Indonesia memiliki keunggulan dalam kerajinan gerabah dengan kualitas dan variasi yang bisa bersaing dengan produk luar negeri," ujar Edhie, yang akrab disapa Ibas.

Dalam kunjungannya, Ibas mengaku terkesan dengan semangat tinggi para pengrajin. Apalagi, kebanyakan dari mereka adalah lansia yang tetap setia menjaga tradisi ini meski dengan proses yang masih manual. Proses pembuatan gerabah dimulai dari persiapan tanah liat hingga tahap finishing yang memerlukan ketelatenan dan keahlian khusus.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Ibas memberikan bantuan berupa dua gerobak dorong serta menerima hadiah berupa gerabah dengan tulisan "Terima Kasih Ibas" dari para pengrajin. Ia juga berharap agar produksi gerabah di Desa Kartoharjo dapat terus meningkat, menghasilkan tidak hanya cobek tradisional tetapi juga vas, gentong, dan produk lainnya yang lebih bervariasi.

"Bantuan dari Mas Ibas sangat berarti bagi kami. Kami berharap, hubungan ini terus berlanjut untuk mendukung pengembangan usaha di sini," ucap Sutarno, pembina Pokmas Elang, dengan penuh rasa syukur. Dengan adanya dukungan ini, harapan baru tumbuh di Desa Kartoharjo untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi kerajinan gerabah yang telah menjadi identitas budaya dan ekonomi lokal.



Andi Akmal Pasluddin

Beri Bantuan Motor

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin memberi bantuan motor tiga roda kepada warga Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Batuan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam acara tersebut,
AAP, panggilan
akrabnya, secara
pribadi menyerahkan
motor tiga roda
kepada Muh. Amir, seorang warga
Kelurahan Bukaka. Bantuan ini
diharapkan dapat membantu
meningkatkan mobilitas dan
ekonomi penerima bantuan.

"Penyerahan bantuan motor tiga roda kepada warga Kelurahan Bukaka bukan sekadar seremoni, tetapi sebuah wujud nyata dari aspirasi kita bersama untuk membangun komunitas yang lebih baik," tutur Akmal.

Politisi yang juga merupakan anggota Komisi IV DPR RI ini merasa bangga karena sudah 10 tahun bersamai masyarakat dan sudah sekian banyak bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. "Setiap tahun, kami dapat menyediakan puluhan motor tiga roda. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus mendukung masyarakat," tambah Akmal.



Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin saat memberikan bantuan motor tiga roda di Sulawesi Selatan.



Farah Puteri Nahlia

Minta Masyarakat Awasi Bantuan Pemerintah

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX Farah Puteri Nahlia mengajak masyarakat Sumedang berperan aktif mengawasi setiap bantuan dari pemerintah yang diperuntukkan masyarakat agar tepat sasaran. Jika masyarakat menemukan ada oknum yang bertindak seleweng, maka masyarakat dapat segera melaporkan ke wakil rakyatnya.



Anggota DPR RI Farah Puteri Nahlia saat berdiskusi dan melakukan kampanye politik dengan masyaraka di Sumedang,

Semua bantuan sosial dari pemerintah (seperti) PKH, BLT, bantuan untuk ibu hamil, bantuan kesejahteraan, bantuan untuk pemuda, itu betul-betul didapatkan oleh masyarakatnya. Karena setahun itu anggaran di desa Rp900 juta per tahunnya, anggaran itu bukan untuk kades, anggaran itu bukan untuk aparat-aparat desa, tapi untuk masyarakatnya. Jadi, apabila anggaran itu tidak sampai ke tangan masyarakat, itu wajib dilaporkan," ujar Farah saat melakukan kampanye politik di Desa Cilengkrang,

Kecamatan Wado, Sumedang beberapa waktu lalu.

Karena, sebut Farah, pemerintah banyak sekali menggelontorkan bantuan untuk masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, ada masyarakat yang belum paham bagaimana cara mengakses bantuan tersebut. "Tapi, kadang program-programnya tidak sampai ke tangan masyarakat karena masyarakat tidak tahu cara mendapatkannya atau saya punya program, tapi tidak dikasih sama salah satu oknum di desa karena mesti nurut ini, nurut itu. Itu namanya tidak berperikemanusiaan, kerjanya tidak benar. karena itu hak masyarakat, tidak boleh hak masyarakat itu ditahan-tahan apalagi diturunkan dengan syaratsyarat tertentu," imbuhnya.

Pada kesempatan itu dirinya mengaku ingin mengubah stigma buruk politik, yang saat ini kerap dianggap membosankan. "Saya ingin mengubah itu, yang katanya politik ngebosenin, yang katanya diktator, yang katanya tajam ke bawah tumpul ke atas, ingin saya ubah. Saya ingin masyarakat melihat politik, melihat demokrasi itu segar tidak ada rasa takut. Saya ingin masyarakat bisa dekat dengan saya, apabila ada aduan-aduan yang ingin disampaikan silakan disampaikan," pungkas politisi PAN ini. aha/mh





Achmad Baidowi

Meriahkan Jalan Santai di Pamekasan

Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi ikut memerihakan Jalan Santai Sehat (JSS) bersama warga Pamekasan. Kegiatan yang diselenggarakan di Kecamatan Batumarmar itu, selain menyehatkan juga menghibur masyarakat.



Anggota DPR RI Achmad Baidowi saat mengikuti acara Jalan Santai Sehat (JSS) dengan warga Pamekasan.

enurut pria yang akrab disapa Awiek ini, warga Batumarmar mendapatkan sejumlah manfaat melalui program jalan sehat tersebut. "Tentunya sebagai ajang silaturahmi sesama warga Batumarmar, termotivasi untuk hidup sehat

kemudian pulang mendapatkan hadiah juga," papar legislator Dapil Jawa Timur XI ini.

Dalam kegiatan ini, panitia menyiapkan sejumlah doorprize. Adapun doorprize yang diberikan kepada peserta berupa lemari es, sepeda listrik, kipas angin, dan hadiah menarik lainnya. Ribuan warga Pamekasan pun turut serta dalam kegiatan ini. Ketua Pelaksana kegiatan
Jalan Santai Sehat Rosid Fansori,
mengapresiasi kehadiran Anggota
DPR RI Dapil Madura yang juga
Sekretaris Fraksi PPP Achmad
Baidowi. "Alhamdulillah di tengah
kesibukan beliau bisa hadir dan turut
berpartisipasi dalam menyukseskan
acara ini," kata Rosid yang juga
Anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi
PPP. •••• eko/mh

Mbah Tono

Pemulung yang Berhaji



Selalu ada kisah teladan yang mengharukan di balik persiapan haji setiap tahun. Para "orang kecil" yang mungkin tersisih dan kalah bersaing secara ekonomi dengan lain, ternyata orang hebat. Mereka mampu menabung bertahuntahun dengan begitu sabarnya, agar bisa menunaikan rukun Islam kelima.

Parlementaria mengangkat satu di antara sosok hebat itu.
Namanya Supartono, akrab disapa Mbah Tono. Di tengah persiapan menjelang keberangkatan jemaah haji di Embarkasi Surabaya, terselip kisah mengharukan tentang Mbah Tono. Pria berusia 61 tahun ini adalah seorang pemulung dari Kelurahan Tinatan, Ponorogo yang telah berhasil mewujudkan impiannnya menunaikan ibadah haji.

Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan oleh PPIH Embarkasi Surabaya (di laman Dinas Kominfo Prov Jaktim), Mbah Tono menceritakan perjalanan panjangnya untuk mencapai Baitullah. Dengan gigihnya, ia mengumpulkan uang dari hasil pekerjaannya sebagai pemulung dan tukang becak untuk membiayai perjalanan spiritualnya ini.

"Saya mulai dari ngebecak tahun 1983, kemudian jadi pemulung, dan pekerjaan apa saja yang halal," ungkapnya dengan tulus. Impian untuk berhaji sudah lama "menghantui" pikiran Mbah Tono. Pada tahun 1998, ia bermimpi digandeng seseorang berkeliling Ka'bah. "Saat terbangun, saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar diberi kesempatan untuk berhaji ke Tanah Suci," ungkapnya

Meski penghasilannya tak seberapa, Mbah Tono tak pernah putus asa. Ia tekun menabung sehari-Rp3 ribu hingga Rp15 ribu. Dengan penuh keyakinan, suatu saat Allah SWT pasti membukakan jalan baginya. "Allah membukakan rezeki dari arah yang tidak terduga," tuturnya, bijak.



Perjuangannya membuahkan hasil pada tahun 2011, ketika ia akhirnya mampu mendaftar haji berkat komisi dari penjualan tanah dan tabungannya sendiri. Setelah itu, rezeki Mbah Tono semakin lancar. Ia mulai beternak kambing dan sapi. Ia juga kerap mendapat bantuan dari warga sekitar.

Saya mulai dari ngebecak tahun 1983, kemudian jadi pemulung, dan pekerjaan apa saja yang halal. Pada tahun 1998, ia bermimpi digandeng seseorang berkeliling Ka'bah. "Saat terbangun, saya berdoa dengan sungguhsungguh agar diberi kesempatan untuk berhaji ke Tanah Suci.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh berkah bagi Mbah Tono. Ia tergabung dalam Kloter 19 Embarkasi Surabaya dan terbang menuju Baitullah pada Kamis, 16 Mei 2024. "Perasaan haru dan bahagia menyelimuti saya saat bersiap untuk memulai perjalanan ini," ujarnya, seraya meneteskan air mata.

Kisah perjuangan Mbah
Tono adalah bukti nyata bahwa
dengan tekad yang kuat dan kerja
keras, mimpi apapun bisa diraih.
Semangatnya yang pantang
menyerah dan keikhlasannya dalam
mengumpulkan uang dari hasil
memulung memberikan inspirasi
yang mendalam bagi banyak orang.
Ia mengingatkan kita bahwa ibadah
haji bukan hanya milik orang kaya,
tetapi bagi siapa saja yang memiliki
tekad dan keyakinan yang kuat.

Dengan kisah inspiratifnya, Mbah Tono menunjukkan bahwa Allah SWT akan membuka jalan bagi siapa pun yang berusaha dengan sungguhsungguh untuk menunaikan ibadah haji. Kehadirannya di antara jemaah haji dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi mengilhami kita semua untuk menghargai nilai-nilai kesungguhan dan ketulusan dalam menjalani kehidupan ini.



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menghadiri penyembelihan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 H, di halaman Masjid Baiturrahman.

Menghidupkan Semangat Berbagi

Rabu, 19 Juni, kompleks parlemen, Senayan menjadi saksi nyata kebersamaan dan ketaatan keluarga besar Sekretariat Jenderal DPR RI, MPR RI, dan DPD RI dalam menapak tilas kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail.

emangat kebersamaan merayaan Iduladha 1445 adalah momentum bagi umat Islam untuk menujukkan keikhlasan berkurban dan berbagai dengan sesama, yang tidak hanya membawa nilai ibadah tetapi juga menjalin silaturahmi.

"Syukur alhamdulillah, tahun ini kita memperoleh 11 sapi dan 7 kambing. Kami berterima kasih kepada para pemberi kurban di Masjid Baiturrahman ini. Ini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah dan keikhlasan umat untuk berbagi dengan sesama," ujar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

Dalam semangat Iduladha, daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial. "Panitia kurban sudah mengidentifikasi masyarakat yang kurang mampu di sekitar kompleks parlemen. Dengan 11 sapi dan 7 kambing ini, kita yakin dapat mendistribusikan daging kurban dengan baik," jelas Indra.

Meskipun tahun ini jumlah hewan kurban menurun dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut tidak menyurutkan semangat ibadah kurban itu sendiri. "Memang tahun ini sedikit turun. Tahun lalu ada 15



Indra Iskandar. Sekretaris Jenderal DPR RI

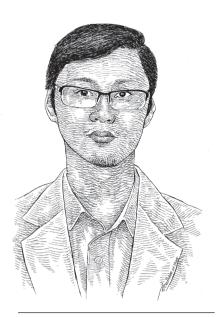
sapi, tahun ini 11 sapi. Namun, saya kira ini tidak mengurangi semangat berkurban di lingkungan kita," kata Indra lagi.

la juga menambahkan bahwa beberapa pejabat sedang melaksanakan ibadah haji dan sebagian lainnya telah mendistribusikan kurban di tempat lain. Penyelenggaraan kurban di kompleks parlemen ini bukan hanya tentang jumlah hewan yang disembelih, tetapi lebih dari itu, ini adalah tentang memperkuat nilai-nilai keikhlasan, ketaatan, dan kebersamaan di antara pegawai.

Dalam kegiatan ini, terpancar jelas semangat untuk mengikuti teladan Nabi Ibrahim dan mempersembahkan yang terbaik untuk sesama. Dengan semangat kebersamaan dan ketaatan yang tinggi, diharapkan tradisi kurban ini terus menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai dan masyarakat sekitar.

Ini adalah bukti nyata bahwa di tengah kesibukan menjalankan tugas kenegaraan, para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPD RI tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat.





Oleh: dr. Febie Putra Suwarna Dokter di RS Harapan Keluarga

ebagai salah satu organ penting di dalam tubuh, jantung memiliki peran sebagai "pusat pompa" darah ke seluruh tubuh, terutama organ penting seperti otak, paru-paru, hati, dan ginjal. Meski demikian, jantung memiliki kesamaan dengan organ lainnya, jantung dapat berfungsi apabila mendapatkan suplai darah dan oksigen.

Jantung sendiri merupakan organ tunggal yang memiliki 4 ruangan yang dibatasi oleh katup-katup. Pada dinding jantung terdapat pembuluh darah kecil yang disebut sebagai pembuluh darah coroner. Pembuluh darah coroner ini adalah pembuluh darah yang kecil dan sangat halus yang berfungsi memberikan suplai darah pada dinding-dinding otot jantung, sehingga memengaruhi kontraksi otot jantung untuk memompa darah.

Pada kondisi serangan jantung, aliran darah pada pembuluh darah coroner berkurang, bahkan bisa sampai tidak mengalir sama sekali, yang umumnya diakibatkan, karena

Jangan Biarkan Serangan Jantung Menghantui Kita

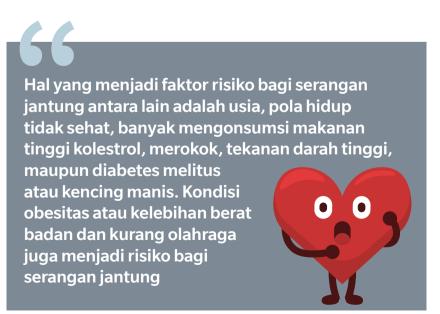
Radang usus buntu atau dalam bahasa medisnya disebut apendisitis adalah peradangan pada apendiks (umbai cacing/usus buntu).

adanya sumbatan pada pembuluh darah coroner. Akibatnya, area jantung yang tidak mendapat pasokan oksigen akan mati. Kematian inilah yang menyebabkan serang jantung atau dalam istilah medis disebut Infark Myocard Acute.

Sampai saat ini, penyebab kematian tertinggi di dunia salah satunya serangan jantung, dimana terdapat laporan sebanyak 4 juta orang meninggal di Eropa tiap tahun dan tercatat pada tahun 2020 terdapat 259.279 kematian akibat serangan jantung di Indonesia.

Gejala yang dikeluhkan antara lain adalah nyeri dada yang terjadi seketika, dapat menjalar ke leher, pundak, menusuk ke punggung, sesak nafas, rasa berdebar-debar, pusing, mual, keringat dingin, bahkan pada kondisi yang tidak tertangani dapat menyebabkan denyut nadi melemah. Kondisi nyeri pada dada yang menjalar kerap kali disalahartikan dengan beberapa penyakit lain dengan gejala serupa.

GERD (Gastrointestinal Reflux Disease) ataupun sakit maag adalah penyakit yang menyebabkan keluhan nyeri pada dada atau rasa terbakar yang menjalar ke bagian ulu hati ataupun leher. Sedangkan keluhan sesak napas sendiri kerap kali dikeluhkan pada penyakit paru. Dengan adanya berbagai keluhan





yang serupa merupakan salah satu penyebab terlambatnya penanganan.

Hal yang menjadi faktor risiko bagi serangan jantung antara lain adalah usia, pola hidup tidak sehat, banyak mengonsumsi makanan tinggi kolestrol, merokok, tekanan darah tinggi, maupun diabetes melitus atau kencing manis. Kondisi obesitas atau kelebihan berat badan dan kurang olahraga juga menjadi risiko bagi serangan jantung. Dewasa ini, pola hidup tidak sehat menjadi bagian penting peningkatan jumlah kasus baru serangan jantung pada usia muda. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui cara mencegah dan menanganinya.

Perlu diingat bahwa serangan jantung umumnya terjadi secara akut, oleh sebab itu saat merasakan adanya gejala-gejala tersebut maka penting untuk segera mendapatkan penanganan di pusat pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Semakin cepat penanganan diberikan maka semakin baik hasil pemulihannya. Jika menemukan kondisi pingsan terjadi, maka dapat dilakukan pertolongan pertama dengan memberikan Resusitasi Jantung Paru (RJP).

Namun kondisi serangan jantung dapat dicegah dengan melakukan hal berikut:

- Mengontrol diet atau pola makan dan kualitas makanan. Kurangi makanan tinggi kolestrol, mengandung caffeine, maupun berpotensi menyebabkan asam urat.
- Rutin berolahraga, umumnya yang dianjurkan adalah olahraga ringan-sedang seperti jalan pagi, jogging, berenang. Pada pagi

- hari, tingkat nitric oxide pada udara sangat tinggi, dimana zat ini bekerja untuk membantu pelebaran pembuluh darah, khususnya pembluh darah yang kaku dan tersumbat.
- Rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah, kolestrol, dan kadar gula darah. Perusahaan sebaiknya juga memfasilitasi pemeriksaan Medical Check Up bagi para karyawannya.
- Mengubah pola hidup seperti tidak merokok, tidak minum kopi dan minuman manis lainnya, tidur selama 6-8 jam dengan kualitas tidur yang baik.
- Mengonsumsi obat-obat penyakit kronis dengan teratur sehingga regulasi tubuh dapat selalu terjaga dengan baik dan optimal.

um/mh

Gombong:

Dari Benteng Kolonial sampai Rumah Pionir Kosmetik Nusantara

Selain dikenal karena tempe mendoannya yang enak, Gombong merupakan destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini saya pun berkesempatan menengok peninggalan sejarah seperti Benteng Van Der Wijck dan Roemah Martha Tilaar.

Meski cuma kecamatan di dalam Kabupaten Kebumen, namun Gombong memiliki kemudahan akses mulai dari stasiun kereta api yang besar. Dilalui oleh jalan nasional, menjadikan Gombong punya lokasi strategis. Ternyata kecamatan ini memang punya sejarah penting. Kala itu sebelum Belanda ikut campur urusan Keraton Kesultanan Yogyakarta, Gombong masih berada dalam lingkup pewaris kerajaan Mataram itu.

Saat Belanda bercokol di tanah Jawa, pelabuhan seperti Cilacap menopang jalur perdagangan dari Laut Selatan. Keberadaan Gombong sebagai tempat perhentian sementara untuk loji-loji itu, membuat desa ini menjadi semakin ramai pendatang. Untuk menjaga stabilitas kawasan ini, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan membangun benteng sekaligus

> kantor administratif, perwakilan kekuasaan yang ada di Batavia.



Benteng Van Der Wijck

Dalam bayangan saya benteng ini ialah setting film "The Raid 2:
Berandal" yang fenomenal itu. Film aksi yang melambungkan nama Iko Iwais di dunia
Hollywood









tersebut menggambarkan benteng sebagai penjara bagi pemeran utamanya. Adegan perkelahian di penjara didera hujan deras dan penuh dengan lumpur yang basah.

Pada kenyataannya, benteng ini tertata rapi. Tidak ada satu pun lumpur di lapangan tengahnya. Sebagai objek wisata populer di kecamatan ini, benteng mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerahnya. Beberapa penginapan kecil berdiri di sekitaran benteng dan menghidupkan ekonomi lokal.

Asal-usul nama benteng ini sebenarnya masih kabur. Ada yang mengatakan bahwa nama Van Der Wijck berasal dari nama komandan bala tentara Hindia Belanda yang bertugas di area tersebut. Walau tak jarang ada yang menyangkutpautkannya dengan Novel "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" karangan Buya Hamka. Namun yang pasti karya sastra karangan novelis dari Minangkabau itu tidak ada kaitan sama sekali dengan benteng ini.

Yang jelas benteng ini didirikan pada abad ke-19. Uniknya, benteng ini punya bentuk sisi delapan, cuma satu-satunya di Indonesia. Tampaknya hal ini disebabkan lokasi benteng yang berada di pedalaman. Lain halnya benteng-benteng kolonial yang berada di pesisir. Misalnya, Benteng Pendem di Cilacap memiliki bentuk persegi dan beberapa komplek yang rumit. Hal itu untuk menahan potensi serangan dari laut,

sementara Benteng Van Der Wijck harus mempertahankan diri dari semua sisi di tanah yang datar.

Roemah Martha Tilaar

Seorang teman dari Gombong semasa kuliah menceritakan bahwa Martha Tilaar, pendiri dan pemilik perusahaan kosmetik nasional 'Sariayu' ialah kelahiran Gombong. Dikenal sebagai pengusaha pionir kosmetik lokal dan khas nusantara itu menambah bangga warga Gombong. Bahwa, puteri daerahnya ada yang sukses di kancah nasional.

Kebetulan, per tahun 2014, keluarga Tilaar membuka untuk umum rumah keluarganya yang bergaya kolonial klasik sebagai museum dan rumah budaya. Rumah ini didirikan oleh kakek Martha, Liem Siaw Liam atau yang dikenal masyarakat sebagai Baba Solam, pada tahun 1920. Peranakan Tionghoa itu ialah pedagang ulung yang memasarkan hasil bumi Karisidenan Kebumen pada masa kolonial. Sampingannya ia memiliki usaha peternakan sapi yang menghasilkan daging dan susu.

Rumah ini tergolong megah pada zamannya, yakni memiliki beranda dan halaman yang terbilang luas. Sentuhan kolonial tampak dari dinding betonnya. Sementara ornamen penghias rumah bercorak Tionghoa dengan penghias piring keramik dan guci. Di rumah ini juga terdapat altar leluhur serta pintu partisi di mulut koridor seperti rumah





Tionghoa pada umumnya.

Kunjungan ke rumah ini mengakhiri perjalanan saya ke Gombong. Dalam amatan saya, sebagai museum, bangunan rumah sudah dilengkapi instalasi pamer dan keterangan yang membantu pengunjung memahami kisah keluarga Martha Tilaar. Selain itu, galeri yang ada di museum ini menjual produk bisnis dari Martha Tilaar dan kerajinan tangan khas Indonesia, khususnya daerah Gombong. Tak ketinggalan, beberapa kegiatan kebudayaan seperti diskusi, lokalatih, festival, pertunjukan, dan pameran seni dapat ditampung di rumah ini. aha/mh --- um/mh

Eko Patrio Hobi Bermain



Sukses sebagai politikus, pengusaha dan komedian, Eko Patrio ternyata punya hobi cukup berbeda dari biasanya. Hobi laki-laki bernama asli Eko Hendro Pratomo ini adalah bermain lego.

pobi tersebut diungkap dalam vlog Denny
Cagur TV ketika Denny mengunjungi Eko ke kantornya. "Ini refreshing gue. Kalau lo ke apartemen gue, ke rumah gue, ada beginian (lego)," kata Eko melalui kanal YouTube Denny Cagur TV.



Eko Patrio saat memperlihatkan koleksi legonya yang cukup banyak.

Lego adalah permainan yang terdiri dari bongkahan plastik yang disusun hingga menjadi suatu rupa, seperti mobil, kereta api, bangunan, kota, patung, kapal, kapal terbang, pesawat luar angkasa, robot, dan lainnya. Eko mengaku hobi ini sudah digelutinya sejak lama untuk menghilangkan stres. Hobi lego ini pun bermula ketika dirinya sering membelikan mainan lego untuk anaknya.

"Lumayan lama, pertama nemenin anak belanja. Dari umur 3 tahun sampai dia 18 tahun," papar Eko. la bercerita bahwa dirinya cukup sering merakit lego ketika ada kesempatan. Dia bahkan sudah memiliki ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan koleksi lego miliknya.

Ada satu ruangan dibikin kayak wahana lego semua, ujar Eko kepada Denny Cagur. Adapun untuk legolego berukuran besar yang sudah dirakitnya, terkadang ia simpan dalam wadah kaca agar tidak terbongkar kembali.



Basuki Digoda Boyman Harun

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun, menilai gerak tubuh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, saat ini berbeda. Pasalnya, menurut Boyman Harun, Basuki agak tegang usai menjadi pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Nusantara.

terkait rencana kerja anggaran 2025. "Saya melihat pagu anggaran di 2025, kemudian pagu indikatifnya seperti itu kayaknya harus berebut juga ini, Pak, berebut informasi, berebut perhatian agar perjuangan kami di dapil mudahmudahan bisa diakomodir," ujar Boyman.

Boyman kemudian menyebut

al itu disampaikan banyak kerja sama yang sudah Boyman saat rapat terlaksana bersama Kementerian Komisi V DPR dengan PUPR. Boyman kembali berterima Menteri PUPR Basuki kasih kepada Basuki dan di kompleks parlemen, menggodanya lagi, agar tidak terlalu Senayan, awal Juni silam. Basuki di tegang. eko/mh mata Boyman, biasanya hadir rapat dengan santai, namun saat ini terlihat berbeda. "Hari ini nampaknya Pak Menteri tidak seperti biasa, Pak. Biasanya santai, rileks, ini agak tegang semenjak jadi ketua (kepala) otorita ini. Santai-santai aja, Pak. Makanya, saya hari ini santai aja ini, Pak," kata Boyman, seraya tersenyum. Ucapan Boyman tersebut membuat jajaran Kementerian PUPR tersenyum dalam rapat. Boyman kemudian masuk ke dalam tema rapat

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun.

